

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI PROGRAM SMART KAMPUNG DI
KABUPATEN BANYUWANGI**
(Studi pada Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

HERDI FEBRI NUGROHO

NIM. 145030100111070



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2019

MOTTO

“jika kamu ingin merubah dunia, mulailah rubah dari dirimu sendiri”

-penulis-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsiku

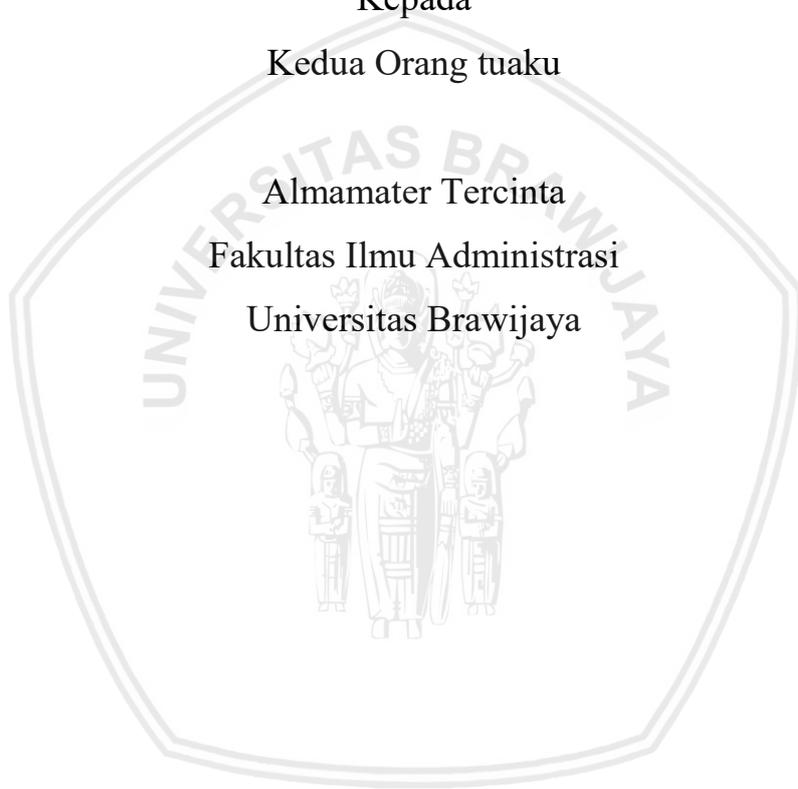
Kepada

Kedua Orang tuaku

Almamater Tercinta

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

1. Judul : "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi (Studi pada Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)"

Disusun oleh : Herdi Febri Nugroho
NIM : 145030100111070
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 2 Juli 2019
Komisi Pembimbing,

Ketua Komisi Pembimbing

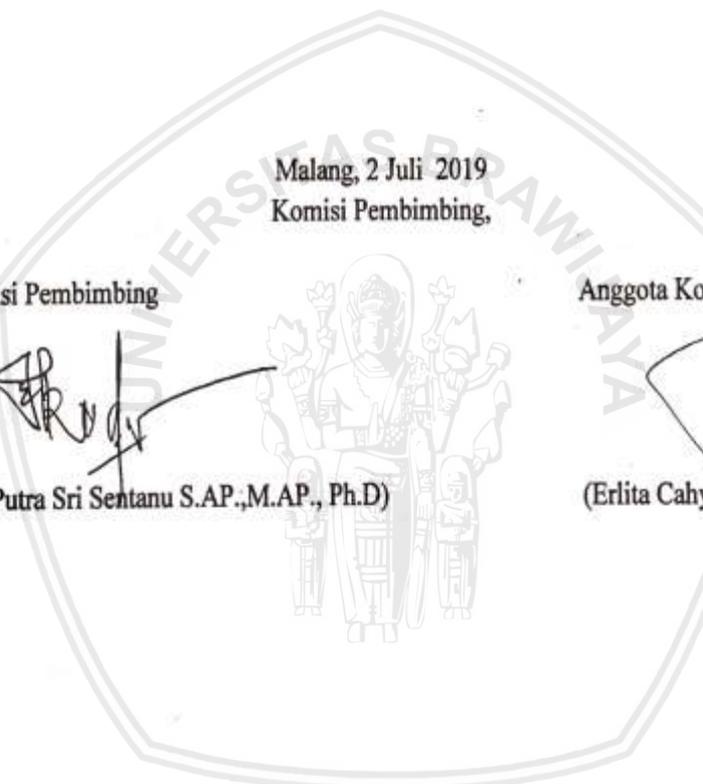


(. I Gede Eko Putra Sri Sentanu S.AP.,M.AP., Ph.D)

Anggota Komisi Pembimbing



(Erlita Cahyasari, S.AP., M.AP)



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
 Tanggal : 18 Juli 2019
 Waktu : 12.00 – 13.00 WIB
 Skripsi Atas Nama : Herdi Febri Nugroho
 Judul : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi (Studi pada Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

I Gede Eko Putra Sri Sentanu S.AP.,M.AP., Ph.D
 NIP. 2011 0783 12041 000

Erlita Cahvasari,S.AP.,M.AP
 NIP. 2011 0786 0724 2 001

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
 NIP. 19430817 197412 2 001

Dr. Ainul Hayat, S.Pd.,M.Si
 NIP. 19730713 200604 1 001



Scanned with
 CamScanner



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul **"Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi (Studi pada Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi"** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 2 Juli 2019



Herdi Febri Nugroho
NIM. 145030100111070

RINGKASAN

Herdi Febri Nugroho, 2019, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program *Smart Kampung* di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi), Dosen Pembimbing : I Gede Eko Putra Sri Sentanu S.AP.,M.AP.,Ph.D , Erlita Cahyasari S.AP., M.AP.

Program “*Smart Village*” berbasis desa yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi efektif dalam menggerakkan ekonomi lokal, terutama warga desa. Program ini disebut “Smart Kampung” yang diluncurkan di Banyuwangi, telah ada 41 desa/kelurahan yang menjadi *pilot project* “*Smart Kampung*” dan saat ini sebanyak 176 desa. Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart kampung* di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi 2) Untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Smart Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dan 3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart kampung* di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari keempat kriteria data tersebut adalah kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*). Teknik analisis data yaitu menggunakan langkah-langkah pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

Bentuk-Bentuk Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart kampung* di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yaitu memberikan bantuan motivasi moril, bentuk-bentuk bantuan motivasi moril tersebut yaitu sebagai berikut: Pelatihan usaha, Permodalan, Pendidikan, Penyediaan Sarana dan Prasarana Aktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Smart Kampung yaitu Pemerintah, PT. Telkom, Tbk dan masyarakat. Faktor pendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu adanya komitmen dalam proses pengelolaan desa dan sarana serta prasarana. Secara eketernal menunjukkan bahwa dukungan pihak swasta dalam hal ini PT. Telkom, Tbk. Adapun faktor penghambat yaitu komitmen pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan jaringan internet yang digunakan untuk program Smart Kampung sering mengalami permasalahan sehingga aktivitas tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Kata Kunci: **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Program *Smart Kampung***

SUMMARY

Herdi Febri Nugroho, 2019, **Economic Empowerment of the Community through a *Smart Kampung* Program in Banyuwangi (Study on Ketapang village Kalipuro Sub-District Banyuwangi)**, I Gede Eko Putra Sri Sentanu S.AP.,M.AP.,Ph.D , Erlita Cahyasari S.AP., M.AP

“Smart village” programs initiated by the Banyuwangi district government were effective in driving the local economy, especially the villagers. This program is called “Smart Kampung” which was launched in Banyuwangi, there have been 41 villages which become pilot project of program “*Smart Kampung*” and currently there are 176 villages. The purpose of this study is 1) To find out the economic empowerment of the community through the “Smart Kampung” program in Ketapang village Kalipuro Sub-District Banyuwangi 2) To find out who are the actors involved in economic empowerment of the community through the “Smart Kampung” program in Ketapang village Kalipuro sub-district Banyuwangi, and 3) To find out the supporting factors and inhibiting factors of economic empowerment of the community through the “Smart Kampung” program in Ketapang village Kalipuro sub-district Banyuwangi.

In this study the researcher used a type of descriptive research using a qualitative approach. Data analysis used in this study is composed of the four criteria of data are credibility, transferability, dependability and confirmability. Data analysis techniques are using steps to collect data, condense data, present data and draw conclusions.

The forms of community economic empowerment through the Smart Kampung program in ketapang village ketapang subdistrict Banyuwangi which is moral motivational. The forms of moral motivation assistance are as follows: business training, capital, education, provision of facilities and infrastructure. The actors involved in community economic empowerment through the Smart Kampung program are the government, PT Telkom Tbk and the community. Supporting factors for community economic empowerment are the commitment in the process of village management and facilities and infrastructure. Externally shows that the support of the private sector in this case PT. Telkom, Tbk. As for the inhibiting factors, namely the commitment of Banyuwangi District Government and the internet network that is used for the Smart Kampung program often experience problems so that activities cannot be carried out optimally.

keyword: Economic Empowerment of the Community and Smart Kampung program

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Ynag Maha Esa, Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Smart Kampung Di Kabupaten Banyuwangi (studi pada desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan program sarjana (S1) dan memperoleh gelas Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak prof. Dr Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Andi Fefta Wijaya, MDA, Ph.d, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Bapak I Gede Eko Putra Sri Sentanu S.AP., M.AP., Ph.D dan Ibu Erlita Cahyasari ,S.AP.,M.AP selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmu selama proses bimbingan skripsi dengan penulis. Kesabaran serta dorongan yang sangat berarti bagi penulis sehingga

dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bantuan beliau, skripsi ini tidak akan selesai dengan baik;

5. Ibu Ida Fauziah S.T selaku Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi , Bapak H. Slamet Kasihono S.Ag selaku Kepala Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, Bapak Syamsul Arifin selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat di kantor desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dimas selaku staff desa Ketapang bagian pengelolaan program *Smart* Kampung yang telah membantu dan meluangkan waktunya dalam penelitian ini, memberikan informasi mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *Smart* Kampung, menjadi informan dalam penelitian skripsi ini sekaligus membimbing penulis selama penelitian dan memperlakukan penulis sangat baik sehingga penulis merasa terima kasih tidaklah cukup;
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;
7. Bapak Mulyadi S.Pd dan Ibu Hero Yekti S.Pd selaku Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan semangat maupun dukungan berupa doa, sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan. Herdian Surya Nusantara dan Kivlan Satrio Pamungkas selaku saudara penulis yang selalu mengingatkan untuk cepat menyelesaikan skripsi ini;
8. Sahabat-sahabat saya, sahabat yang tinggal bersama dikontrakan Joyogrand blok K129 Ardy Maulana, Ade Wido Yanuardi, Uyun Sadewa, Eryanto

Riza Fahtony, Nanda Rizky, Affan Lazuardi, Firham Adi Putra yang selalu memberi semangat pada penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir skripsi ini;

9. Dan teman-teman FIA jurusan Administrasi Publik angkatan 2014 yang memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, peneliti mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan pada skripsi ini, baik dalam penyajian materi maupun dalam penyusunan. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga hasil skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang , 20 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDU	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSENBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSIi	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	vii
<i>SUMMARY</i>.....	viii
KATAPENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Administrasi Publik	18
1. Definisi Administrasi Publik.....	18
2. Fungsi Administrasi Publik.....	20

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	23
1. Pemberdayaan Masyarakat.....	23
2. Proses Pemberdayaan.....	24
3. Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan masyarakat	25
4. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan.....	27
5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	29
C. Implementasi Program.....	34
1. Pengertian Program.....	34
2. Pengertian Implementasi.....	35
3. Konsep Implementasi Program.....	36
4. Pendekatan-Pendekatan Implementasi.....	41
5. Proses Implementasi Program.....	42
D. <i>Smart</i> Kampung	47
E. Konsep <i>Smart</i> Kampung Kabupaten Banyuwangi	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Fokus Penelitian.....	54
C. Lokasi dan Situs.....	56
D. Sumber Data	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	59
F. Instrumen Penelitian	62
G. Teknik Analisis Data	63
H. Keabsahan Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi	69
1. Sejarah Kabupaten Banyuwangi	69
2. Visi Misi Kabuputen Banyuwangi.....	70
3. Letak Geografis Kabupaten Banyuwangi	72

4. Gambaran Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi	74
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	76
1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program <i>smart</i> kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi	76
2. Aktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Smart Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi	94
3. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program <i>smart</i> kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi	102
C. Pembahasan	113
1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program <i>smart</i> kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi	113
2. Aktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Smart Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi	123
3. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program <i>smart</i> kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi	129
BAB V PENUTUP	134
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	137
DAFTARPUSTAKA	139
LAMPIRAN	142

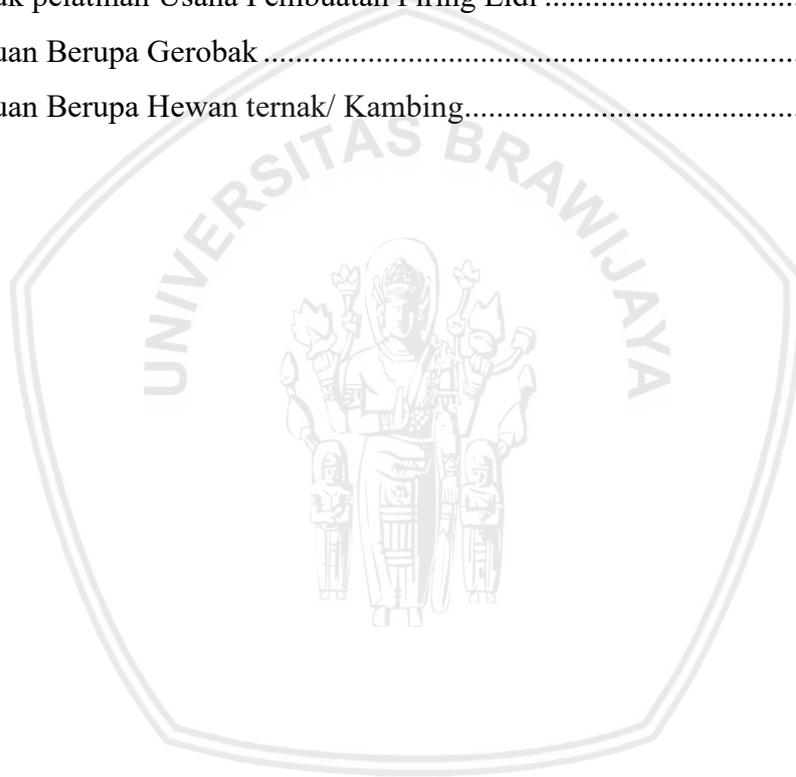
DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
4.1	Nama-Nama Penerima Bantuan Modal Usaha Melalui Program <i>Smart</i> Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018	81
4.2	Nama-Nama Penerima Bea Siswa Melalui Program <i>Smart</i> Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018	88
4.3	Paran Aktor Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program <i>Smart</i> Kampung Di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi	128



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
2.1	Model Implementasi Program	37
3.1	Analisis Model Interaktif	67
4.1	Peta Kabupaten Banyuwangi	72
4.2	Bentuk pelatihan Usaha Pembuatan Piring Lidi	79
4.3	Bantuan Berupa Gerobak	86
4.4	Bantuan Berupa Hewan ternak/ Kambing.....	86



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar peneliti bersama informan bapak Syamsul Arifin selaku pegawai Desa Ketapang bagian Kesejahteraan Masyarakat.....	144
Gambar peneliti bersama informan bapak Dimas selaku staff desa Ketapang bagian pengelolaan program Smart Kampung.....	144
Surat keterangan selesai penelitian dari desa Ketapang	145
Surat Permohonan ijin penelitian skripsi dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya	146
Surat keterangan selesai penelitian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi	147
Peraturan Bupati No 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja berbasis Desa/Kelurahan Melalui Program Smart Kampung	148

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan di Indonesia tentu tidak terlepas dari adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat (Todaro, 2013). Selain itu arti dari pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut (Suhariyono, 2013).

Dengan meningkatnya pendapatan perkapita diharapkan masalah-masalah ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi negara sedang berkembang dapat diatasi (Safitri, 2015). Upaya ini dapat diwujudkan dan didukung melalui proses atau aktivitas pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat (Slamet, 2003). Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan

masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014).

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya (Suharto, 2005). Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (Sumodiningrat, 2009). Upaya pemberdayaan masyarakat juga tidak dapat terlepas dari kebijakan pemerintah sehingga dapat memberikan dukungan dalam proses atau sistem pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan, dimana bentuk riil yaitu dengan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai upaya memaksimalkan aktivitas pemberdayaan yang dilakukan.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal yaitu 1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren

yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan 3) Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Keberadaan otonomi daerah merupakan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lahir sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori areal *division of power* yang membagi kekuasaan dan kekuatan negara secara vertical dan merupakan bentuk kebijakan nyata terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan dan pemberdayaan yang dewasa ini diwarnai dengan adanya perubahan globalisasi.

Salah satu contoh yang sangat baik untuk menunjukkan bagaimana pemerintahan Orde Baru begitu jauh dalam melakukan penataan-penataan masyarakat yang justru mengingkari semangat demokrasi adalah penyeragaman pemerintahan desa. Dengan adanya penyeragaman pemerintahan desa menurut keinginan pemerintahan pusat, tentu saja telah mengingkari keragaman nilai-nilai lokal yang dimiliki oleh berbagai daerah, padahal Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa tentu saja sangat majemuk. Dengan adanya sentralisasi pemerintahan dan politik yang dikembangkan oleh Orde Baru, maka elit-elit desa dengan cepat terakomodasi

menjadi bagian dari elit nasional. Sentralisasi juga dibarengi dengan upaya untuk membunuh demokrasi ditingkat desa (Nadir, 2013).

Kebijakan pemerintah dengan adanya memberikan otonomi kepada daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui keberadaan otonomi daerah tersebut berdampak pada pengelolaan asset daerah sebagai upaya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat (Jupir, 2013:6). Kebijakan otonomi daerah juga memberikan peluang kepada daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah dan menjadi dasar dalam pembentukan UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Pengertian tentang Desa dari Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan pengertian desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 6 tahun 2014 juga memberikan dukungan untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat miskin khususnya di wilayah pedesaan.

Kebijakan otonomi daerah juga berimplikasi terhadap sistem administrasi pemerintahan desa. Artinya kedudukan desa sebagai subsistem pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan nasional di Indonesia memerlukan

adaptasi dan antisipasi perkembangan tersebut. Salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di tingkat desa sebagai upaya untuk proses pemberdayaan masyarakat (Solekhan, 2014). Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia tahun 2018 Mencapai 265 Juta Jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan.

Apabila mengacu pada data yang dikeluarkan bank dunia, yaitu laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,2%/ tahun maka jumlah penduduk tahun 2018 **mencapai 265 juta jiwa**. Penduduk Indonesia yang saat ini lebih dari 53,3% berada di daerah perkotaan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018), sisanya tersebar di daerah pedesaan, namun hal itu akan berbalik jika saat ini tidak ada solusi untuk mengatasi kesenjangan di desa dalam hal infrastruktur maupun teknologi, sehingga upaya untuk menurunkan tingkat kepadatan kota dapat dilakukan. Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin tahun 2018 mencapai 25,95 juta orang. Jumlah penduduk miskin itu berkurang 633,2 ribu orang dibandingkan tahun 2017 sebesar 26,58 juta orang atau 10,12 persen dari total penduduk dan jumlah tersebut terjadi di wilayah pedesaan. Kondisi ini menjadi hal penting untuk dilaksanakan terkait dengan proses pemberdayaan masyarakat desa.

Program “*Smart Village*” berbasis desa yang digagas oleh Pemkab Banyuwangi efektif dalam menggerakkan ekonomi lokal, terutama warga desa. Instrumen teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mampu mendorong

keaktivitas warga dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif (*Retno Wulan Sekarsari, 2018, Smart Kampung Sebagai Wujud Kemajuan Sistem Administrasi dan Manajemen, www.banyuwangikab.go.id*). Program "Smart Kampung" yang diluncurkan di Banyuwangi telah ada 41 desa/kelurahan yang menjadi *pilot project* "Smart Village" dan saat ini sedang disiapkan untuk 176 desa lainnya. "Smart Kampung" adalah program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan (Iswandi, 2017, *Smart Kampung Banyuwangi Gerakan Ekonomi Lokal, www.banyuwangikab.go.id*).

Upaya untuk menciptakan dan mendukung terciptanya *smart village* maka diperlukan untuk berkolaborasi lintas industri/ sektor dan unsur-unsur pendukung lainnya. Jadi peran serta masyarakat dan pemerintah menjadi hal yang penting untuk dilakukan sehingga upaya untuk menciptakan *smart village* dapat dimaksimalkan. Secara riil harus melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas teknologi, pemerintah daerah, litbang akademik, organisasi sosial, perusahaan besar dan kecil, petani, buruh, dan lain-lain. Banyak dari organisasi ini berada di luar ekosistem desa, namun relatif cukup memiliki pengaruh untuk terlibat dalam program *smart village*. Hasil penelitian Supriyadi (2016) menunjukkan bahwa implementasi dari aplikasi ini nantinya bisa digunakan dalam bentuk mobile android sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengaplikasikannya dan sistem *smart village* ini

masyarakat bisa memberikan informasi secara detail dan memasarkan produk yang dihasilkan kepada masyarakat lain secara luas sehingga memberikan dukungan dalam upaya peningkatan perekonomian keluarga. Hasil yang sama juga ditunjukkan dari hasil penelitian Aditama (2018) dimana dengan potensi apa yang ada di desa melalui *smart village* dapat difokuskan untuk dikembangkan sehingga dapat memicu perekonomian atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.

Oleh karenanya, pemerintah desa maupun masyarakat desa membutuhkan bantuan segenap elemen untuk mewujudkan *smart village*. Membangun *smart village* atau desa cerdas tidak semata-mata terbatas pada kecanggihan ICT (*Information Communication and Technology*) saja, tetapi yang lebih utama dan perlu ditekankan adalah bagaimana konsep *smart village* ini bisa mengubah kapasitas masyarakatnya dan cara mereka berinteraksi.

Operasionalisasi desa cerdas dapat dipusatkan di kantor desa dan balai desa, sehingga desa dan balai desa akan terus dikunjungi oleh masyarakat desa dengan berbagai ragam aktivitas. Balai desa dan kantor desa diharapkan bisa berfungsi pula sebagai rumah kreatif warga atau dapat ditingkatkan lagi menjadi wadah *citizen-sourcing*, yaitu tempat untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam memberikan ide atau inovasi yang dapat dikembangkan di desanya, bahkan para *expertise* atau pakar dapat diundang ditempat ini untuk memberikan saran terobosan bagi kemajuan desa.

Pada tahun 2010-2017 pertumbuhan perekonomian yang berada di Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya meningkat pesat. Peningkatan nilai

ekonomi paling tinggi pada tahun 2014-2015 sebesar 6.81 triliun. Pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi ditopang oleh sektor-sektor ekonomi secara lebih merata mulai dari pertanian, kehutanan, pertambangan, industri, konstruksi, perumahan dan pariwisata. Kabupaten Banyuwangi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 6,57 persen pada tahun 2018mendatang. Untuk mencapainya, sejumlah upaya dilakukan untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Salah satunya menjaga konsumsi masyarakat dan mendorong efektivitas belanja daerah.pertumbuhan ekonomi Banyuwangi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2016, PE Banyuwangi sebesar 6,01 persen, lebih tinggi dari PE provinsi Jawa Timur dan nasional. Tren positif ini membuat daerah optimis dengan kondisi ekonomi yang terus kondusif di tahun depan dengan proyeksi pertumbuhan pada kisaran 6,57 persen.

Pada tahun 2017 sebanyak 189 desa di Kabupaten Banyuwangi menerima Dana Desa dari pemerintah pusat sebesar 134,467 miliar dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Banyuwangi sebesar Rp 93,018 miliar. Sehingga total dana yang mengalir ke desa secara langsung mencapai Rp 227,48 miliar. Tiap desa, rata-rata menerima dana antara Rp 950 juta hingga Rp 1,6 miliar (banyuwangi.merdeka.com). Dana tersebut merupakan dana yang digunakan sebagai pendukung proses pengelolaan dan pelaksanaan Program *Smart* Kampung dan mendukung program-program inovasi yang dilakukan.Keberadaan program "*Smart* Kampung" semakin mendorong ekonomi lokal, termasuk meningkatkan pendapatan per kapita warga. Dalam lima tahun terakhir, pendapatan per kapita warga Banyuwangi sudah naik 80

persen dari Rp 20,8 juta per orang per tahun pada 2015 menjadi Rp 37,53 juta per tahun pada 2018 (Ardian Fanani, 2018, Wah, *Smart Kampung Banyuwangi Juga Dilirik AS*, news.detik.com)

Desa Ketapang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang memiliki program *smart kampung*. Program pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya untuk menciptakan Desa Ketapang sebagai *smart village* dengan berbagai program diharapkan mendukung upaya untuk meningkatkan motivasi masyarakat dan sosialisasi sebagai upaya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu indikator dari program *Smart Kampung* yang ada di Desa Ketapang yaitu “*One Stop service*” indikator dinamakan *smart kampung* bahwa suatu program harus memenuhi persyaratan tertentu jadi pelaksanaan pelayanan *smart kampung* memiliki model pelayanan berbasis pada satu lingkup ruang tujuannya memberikan pelayanannya harus secara cepat, tepat dan efisien”. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai didukung oleh internet yang bagus kemudian bertempat diruangan yang memenuhi persyaratan pelayanan didukung aplikasi software berbasis *wifi server* dengan pelayanan yang memanjakan dan memangkas biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Beberapa pelayanan Program *Smart Kampung* yang diberikan untuk melayani warga masyarakat Desa Ketapang seperti *Pertama*, SPM (Standar Pelayanan Minimal) Online merupakan surat pernyataan miskin bagi warga masyarakat yang sakit yang tidak terdaftar di JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat). *Kedua*, SKCK (Surat Keterangan Catatan

Kepolisian). *Ketiga*, Akta Kelahiran pelayanan ini biasa disebut orang sana “*Lahir procot bawa akte*” maksud dari kata tersebut dimana bayi yang sudah lahir bisa pulang membawa akte dengan sistem pelayanan pengurusan yang singkat dan yang terakhir adalah akte kematian.

Selain beberapa Program Pelayanan *Smart* Kampung diatas akibat program ini juga muncul sebuah sistem yang disebut SIMADE (Sistem Informasi Manajemen Desa/Kelurahan). Dari sistem ini aparat desa bisa mengakses data sesuai kebutuhan pelayanan dengan menampung semua data kependudukan bahkan perangkat desa bisa mengucapkan ulang tahun bagi warga masyarakat sesuai data yang ada. Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart* Kampung, terdapat 7 kriteria ruang lingkup program kerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni budaya, peningkatan kapasitas SDM, intergrasi pengentasan kemiskinan, informasi hukum.

Kajian dalam penelitian ini fokus pada pemberdayaan bidang ekonomi, dengan pertimbangan bahwa program tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat secara umum, dimana sejak pelaksanaan program *Smart* Kampung khususnya di Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi masih terdapat penduduk yang termasuk dalam garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada September 2018 sebesar 9,66 persen menurun 0,16 persen poin terhadap Maret 2018 dan

menurun 0,46 persen poin terhadap September 2017 (Azwar, 2012, Angka Kemiskinan Banyuwangi Turun, www.bps.go.id)

Khususnya pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat maka dapat diketahui keberadaan Program *Smart* Kampung juga memberikan dukungan terkait dengan pengelolaan ekonomi masyarakat. Bentuk secara nyata dalam melakukan pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu adanya toserba desa, dalam usaha ini Pemerintah Desa bekerja sama dengan distributor terkait dengan kesepakatan harga, sehingga harga yang ada di Toserba desa lebih murah dibandingkan dengan di toko biasa, ini dilakukan juga agar masyarakat mendapatkan kepuasan saat berbelanja, bahkan pemerintah desa juga bekerjasama dengan Bulog untuk kebutuhan bahan pokok. Selain itu upaya pemberdayaan juga dilakukan dengan melakukan manajemen pasar tradisional dengan merombak dan memperbaiki tatanan pasar tradisional. Penataan seperti lahan parkir kemudian tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya terus diperbaiki dengan mendengarkan aspirasi dari pembeli dan pedagang sehingga bisa terwujud pasar tradisional rasa modern.

Bentuk upaya pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi juga diwujudkan dengan adanya program pengembangan usaha UMKM melalui bantuan modal usaha serta pemberian beasiswa sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui program *smart* kampung benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Program *Smart* Kampung berbasis desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu upaya yang diharapkan dapat secara efektif

dalam menggerakkan ekonomi lokal desa. Instrumen teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mampu mendorong kreativitas warga dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif. Bentuk nyata yang dilakukan yaitu keberadaan UMKM di desa diberi pelatihan teknis sehingga aktivitas pemasaran dapat dilakukan secara *online* di situs belanja UMKM banyuwangi-mall.com.

Smart Kampung juga jadi instrumen untuk mempercepat inklusi keuangan alias membuat warga semakin memahami keuangan yang bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemberdayaan ekonomi dalam program "*Smart* Kampung" juga menjadikan balai desa sebagai pusat ekonomi produktif yang difasilitasi pelatihan dan pemasarannya oleh pemerintah daerah, seperti batik dan produk hasil pertanian. (Iswandi, 2017, *Smart* Kampung Banyuwangi Gerakan Ekonomi Lokal, www.banyuwangikab.go.id). Beberapa aktivitas secara nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat terkait dengan keberadaan program "*Smart* Kampung".

Pelaksanaan program pada *Smart* Kampung juga tidak terlepas dari upaya nyata dari berbagai unsur yang terlibat didalam pelaksanaan program tersebut. Unsur aatu aktor yang terlibat dalam pelaksanaan *Smart* Kampung tersebut yaitu terbagi menjadi tiga bagian, dimana yang pertama yaitu dari pemerintah daerah selaku penetapan kebijakan, pihak swasta selaku media pendukung dal;am pelaksanaan program, dimana dalam hal ini terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta peran masyarakat sendiri

selaku pelaksana dalam program-program yang telah ditetapkan. Kerjasama dari ketiga aktor tersebut mendukung proses pelaksanaan *Smart* Kampung sehingga seluruh program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka judul penelitian ini yaitu:

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program *Smart* Kampung di Kabupaten Banyuwangi (Studi pada Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi?
2. Siapakah aktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *Smart* Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi?
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dilakukan untuk mencapai suatu perumusan masalah, maka akan terjadi tujuan penelitian tersebut:

1. Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *Smart* Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *Smart* Kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, serta berkontribusi penuh bagi pengembang teori-teori ilmu sosial khususnya ilmu administrasi.
 - b. Selain itu diharapkan juga bisa di jadikan bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang akan di lakukan oleh peneliti selanjutnya.

- c. Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan pada ilmu administrasi, sebagai hasil dari pengamat langsung di lapangan serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang di peroleh selain studi di perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai input bagi instansi bagi umumnya dan khususnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *Smart* Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan mengimplementasikan program *smart* Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang yang mengemukakan tentang alasan yang melatar belakangi penelitian, rumusan masalah yang merupakan masalah yang timbul dan akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang menguraikan hasil apa yang ingin dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian merupakan pernyataan tentang kontribusi hasil penelitian secara spesifik serta sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori yang digunakan sebagai landasan materi untuk menyusun skripsi. Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang berkaitan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan yaitu terkait dengan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian dalam hal ini meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti melakukan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung, aktor yang terlibat dan faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dalam penelitian ini yaitu mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran yang akan disampaikan terkait dengan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Definisi Administrasi Publik

Menurut Pasolong (2013:3), menerjemahkan administrasi sebagai jenis pekerjaan yang sudah terencana yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan berdasarkan efektif, efisien, dan rasional. Pasolong menerjemahkan administrasi sebagai pekerjaan yang sudah direncanakan sebelumnya dan dilaksanakan dengan kerjasama oleh sekelompok orang, untuk mencapai tujuan yang didasarkan efektif, efisien, dan secara rasional. Berarti administrasi merupakan pekerjaan yang terencana, dan dilaksanakan berdasarkan efektif, efisien, serta rasional.

Syafri (2012:11) menjelaskan administrasi sebagai rangkaian kegiatan (proses) usaha kerjasama kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Jadi menurut pendapat syafri administrasi merupakan pekerjaan yang efisien. Berdasarkan pengertian administrasi menurut pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan pekerjaan, kegiatan, maupun pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif, efisien, dan rasional.

Publik menurut Syafri (2012:13) memiliki unsur definisi adanya sejumlah manusia; adanya kepentingan bersama yang mengikat mereka; dan

adanya perasaan bersatu karena ikatan kepentingan tersebut. Jadi, publik didefinisikan sebagai sejumlah manusia yang memiliki kepentingan bersama. Dapat disimpulkan bahwa pengertian publik adalah sejumlah orang atau masyarakat yang memiliki kesamaan dan kepentingan. Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kata publik, atau disebut Administrasi Publik. Secara harfiah, administrasi publik dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya atas dasar persamaan pikiran, sikap, serta tindakan yang efektif, efisien, dan rasional.

Administrasi Publik itu sendiri menurut Chandler dan Piano (1998) dalam Indradi (2010:114) merupakan proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi Publik menurut Henry yang dikutip oleh Indradi (2010:116) adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Sedangkan Darmadi (2009:12) mendefinisikan administrasi publik sebagai aktifitas yang dilaksanakan oleh manusia baik aktivitas yang dilaksanakan oleh perseorangan atau oleh lembaga eksekutif ataupun lembaga lain yang berkaitan

dengan pengaturan sumber daya untuk mencapai tujuan kemasyarakatan. Administrasi Publik diartikan sebagai keseluruhan proses koordinasi dari usaha-usaha perseorangan maupun kelompok dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai arah dan tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya. Jadi administrasi publik dapat disimpulkan sebagai seluruh proses atau rangkaian koordinasi antara perseorangan maupun organisasi (pemerintahan) dalam melaksanakan suatu kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien.

2. Fungsi Administrasi Publik

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan dalam administrasi meliputi seluruh kegiatan yang terdapat dalam suatu organisasi. Rencana yang baik merupakan bagian penting dari proses administrasi dan rencana tersebut akan terlihat setelah dilaksanakan. Perencanaan juga dijadikan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Siagian (2014: 88) menyatakan bahwa *planning* atau perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian dalam administrasi merupakan sebagai proses pembentukan suatu organisasi secara menyeluruh. Menurut Siagian (2014: 95)

mengatakan bahwa pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Melalui fungsi pengorganisasian juga akan menghasilkan suatu organisasi yang dapat diarahkan.

c. *Staffing* (Pengadaan Tenaga Kerja)

Pengadaan atau *staffing* merupakan kegiatan selanjutnya dari fungsi organizing atau pengorganisasian. Dalam fungsi pengadaan ini dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan masuk, proses, dan keluarnya seluruh pegawai. Menurut Sukarna (1990: 75) *staffing* ialah bertalian dengan kepegawaian (personalia) dimulai dari pencalonan, pemilihan, latihan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai. Dari definisi di atas menyatakan bahwa *staffing* merupakan fungsi administrasi yang mengatur kepegawaian secara menyeluruh, baik dari kegiatan rekrutmen sampai pemberhentiannya.

d. *Directing* (Pemberian Bimbingan)

Pemberian bimbingan atau *directing* dalam melakukan suatu pekerjaan sangat penting agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Menurut Sukarna (1990: 76) yang dimaksud *directing* ialah pembimbingan dan pengantaran pegawai agar supaya pekerjaannya dapat diarahkan kepada sasarannya atau dengan kata lain *directing* ialah pengarahan kegiatan kerja pegawai terhadap tujuan yang telah ditentukan. Sukarna juga menambahkan dalam *directing* inipun harus dapat mempengaruhi pegawai untuk bekerja sama

satu sama lain, mengingat hanya suasana kerja samalah tujuan bersama dapat tercapai. Maka dari itu *directing* juga memerlukan sifat kepemimpinan atau *leadership* yang mampu mengarahkan seluruh tenaga kerja dalam melakukan suatu pekerjaan.

e. *Coordinating* (Pengkoordinasian)

Koordinasi dalam melaksanakan suatu kegiatan sangat penting agar dapat dilakukan secara serempak dan searah dengan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Sukarna (1990:77) dapat digambarkan melalui orang-orang yang sedang menjalankan atau mengayuh perahu. Orang-orang yang mengayuh perahu antara bagian sebelah kiri dan sebelah kanan harus dalam waktu dan gerak yang sama, agar supaya perahu itu tidak oleng sehingga terdengarlah suara yang sama pada waktu dayung menepuk air. Gerakan yang sama itu searah pula dengan tujuan perahu yang dikemudikan dari belakang.

f. *Reporting* (Pelaporan)

Pelaporan atau *reporting* berkaitan erat dengan pengkoordinasian atau *coordinating*. Laporan ini sangat penting agar dapat diketahui bagian-bagian pekerjaan yang tidak dapat dilakukan semestinya sehingga dapat mengganggu secara keseluruhan. Hubungannya dengan *coordinating* yaitu apabila terdapat suatu gangguan pada bagian pekerjaan, maka koordinasi pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Maka dari itu pelaporan dimaksudkan sebagai alat pengawasan pada pelaksanaan suatu pekerjaan.

g. *Budgeting* (Penganggaran)

Penganggaran atau *budgeting* sangat identik dengan biaya. Biaya merupakan sebuah kunci dari suatu pelaksanaan pekerjaan. Menurut (Sukarna, 1990:79) mengatakan bahwa *budgeting* merupakan penyusunan dan penetapan anggaran belanja yang diperlukan untuk pelaksanaan *planning*.

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pemberdayaan Masyarakat

Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya.

Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Robinson (2004) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ite (2005) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “empowerment,” yang berarti memberi daya, memberi ”power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.

Payne (2007) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

2. Proses Pemberdayaan

Pranarka & Vidhyandika (2006) menjelaskan bahwa ”proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungansekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apayang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”. Sumardjo (2009) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
5. Bertanggungjawab atas tindakannya.

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

3. Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan masyarakat

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

4. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan bagi paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumberdaya materi dan non material.

Korten dalam Harry Hikmat (2001:16) menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat. *Pertama* memusatkan pemikirandan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga dan komunitas. *Kedua* mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem swaorganisasi. *Ketiga* mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang di organisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Kendati demikian, model pembangunan yang berpusat kepada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*). Model ini memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan.

Pemberdayaan merupakan langkah yang tepat dalam pembangunan lapisan bahwa hanya saja pemberdayaan memerlukan keterlibatan pihak lain selain masyarakat yang diberdayakan itu sendiri dan pihak lain tersebut yang harus benar-benar konsisten dalam program pemberdayaan adalah pemerintah karena pemerintah mempunyai tanggung jawab besar atas keadaan setiap rakyatnya. Hal tersebut akan membentuk konteks bagi 'kontrak kerja' yang mengikat masyarakat miskin dan lembaga terutama lembaga pemerintah yang bertanggung jawab. Batasan tersebut juga akan menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat miskin dan pekerja social mejlankan fungsunya masing-masing.

Strategi pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan namun penulis mencermati lima strategi ini menyangku dan mendasari tentang penting peran pemerintah dalam pemberdayaan, (Suharto, 2007:218-219):

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana tau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuatpengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan maslah dan memenuhi kebutuhan-keebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh

kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.

- c. perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas hidupnya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Daniel, 2014:25). Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu

menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan. Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional

b. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik menurut Darmawan (2014:56) sebagai berikut:

1. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerjadan masyarakat yang pengusaha pinggiran

3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi
4. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai

c. Pola-pola Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan ini *good governance* yang telah dielaborasi sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan,

koherensi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta (Hutomo, 2014:34)

Dalam kondisi ini menyetarakan tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya *pertama*, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja. Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya :

a. Memberikan bantuan motivasi moral

Bentuk motivasi moral ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir data secara maksimal. Bentuk-bentuk motivasi moral itu adalah:

1. Pelatihan Usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual, dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh konkrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui pelatihan semacam ini diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu yang harus ia jalankan, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam pengembangan kegiatan wirausahanya.

2. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu Faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang

cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

Bentuk pemberdayaan yang *kedua*, adalah dengan pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, dimana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak dikemudian hari. Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara, pertama pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa otomatis meringankan beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar, kedua penyediaan sarana dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan proses tempat belajar formal atau pun non formal, atau paling tidak dana yang disalurkan untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga untuk pembenahan fasilitas sarana dan prasarana belajar, karena sangat tidak mungkin menciptakan seorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim.

C. Implementasi Program

1. Pengertian Program

Pembahasan mengenai program tidak dapat dilepaskan dengan aspek kebijakan. Menurut Dye (2002), kebijakan atau yang dalam hal ini adalah kebijakan publik secara prinsip dapat diartikan sebagai "*Whatever*

government choose to do or not to do“. Hal tersebut diperkuat oleh Hogwood dan Gunn (1986) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Dan sebagai suatu instrumen yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan publik dapat berbentuk aturan-aturan umum dan atau khusus baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi pilihan-pilihan tindakan yang merupakan keharusan, larangan dan atau kebolehan yang dilakukan untuk mengatur seluruh warga masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dengan tujuan tertentu.

Sedangkan pengertian program itu sendiri, menurut Jones (2004), program adalah carayang disahkan untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

2. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udojo dalam Wahab (2008:59) dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di

implementasikan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Mazmaniani dan Sabatier dalam Wahab (2008:65), mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi bahwa sesuatu program dinyatakan berlaku atau di rumuskan merupakan fokus perhatian implementasi program, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul yang sudah di sahkannnya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun dampak yang timbul pada masyarakat

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi program adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Di dalam proses kebijakan publik, hal yang paling penting adalah proses implementasi program, dimana suatu kebijakan yang dikatakan berhasil mencapai tujuannya adalah kebijakan yang diimplementasikan secara benar sehingga tujuan dari sebuah kebijakan tercapai, keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

3. Konsep Implementasi Program

Implementasi program pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah program dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh

Winarno, menjelaskan bahwa implementasi program adalah: “Implementasi program dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan eknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewartdalam Winarno, 2012:101-102)

Jadi implementasi program merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat program juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

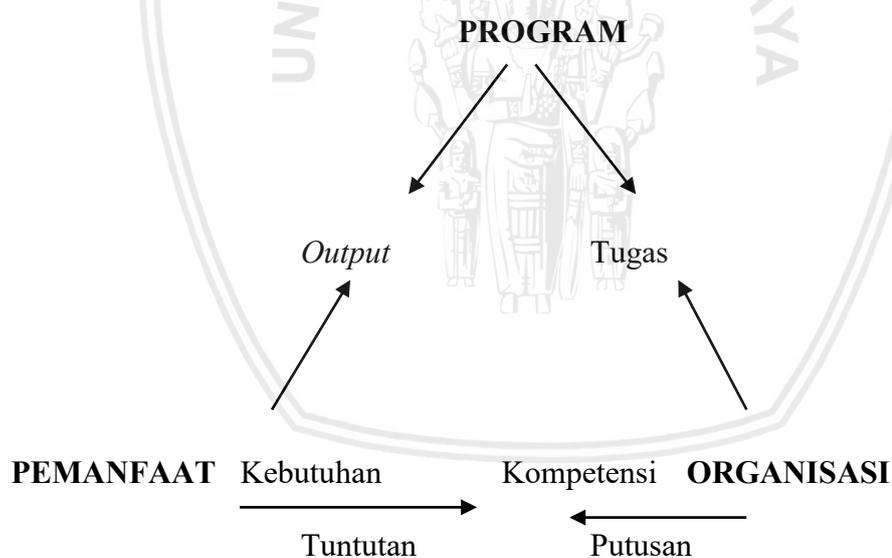
Nugroho (2014:433) memberikan pengertian tentang implementasi program sebagai “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Proses implementasi kebijakan publik dapat dilaksanakan dengan dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi program *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

- a. Pengorganisasian Struktur oganisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

- b. Interpretasi Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
- c. Penerapan atau Aplikasi Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Implementasi Program

Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program

akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Akib dan Tarigan, 2000: 12).

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Terkait landasan dan mutu implementasi, menurut Islamy dalam Maryono (2010: 43) yang berjudul *Menakar Kebijakan RSBI: Analisis Kritis Studi Implementasi*, untuk bisa melihat apakah proses implementasi telah berjalan dengan baik ada kriteria yang perlu diperhatikan, beberapa diantaranya yakni:

- a. Apakah unit pelaksana teknis telah disiapkan ?
- b. Apakah pelaksana kebijakan telah mengerti akan rencana, tujuan, dan sasaran kebijakan ?
- c. Apakah aktor-aktor utama telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tersebut ?
- d. Apakah koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik ?
- e. Apakah hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan dan dipahami serta dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana kebijakan ?
- f. Apakah kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik?

Kesimpulannya program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Program pemerintah yang menjadi fokus kajian penelitian ini yakni program *smart village* di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

4. Pendekatan-Pendekatan Implementasi

Menurut Wahab (2008:110) untuk mengimplementasikan program dapat digunakan beberapa pendekatan antar lain:

a. Pendekatan Struktural (*struktural Approach*)

Struktur organisasi tertentu hanya cocok pada tipe tugas dan lingkungan tertentu pula. Disini tidak lagi menyamaratakan secara universal anatar organisasi satu dengan organisasi lain. Terdapat perbedaan-perbedaan karakteristik antara organisasi satu dengan yang lain.

b. Pendekatan prosedural dan Manajerial (*procedural and managerial approach*)

Pada pendekatan ini implementasi kebijakan akan mengalami tahap-tahap berupa perencanaan jaringan kerja sampai dengan pengawasan. Pendekatan ini memungkinkan untuk memberikan secara tepat jangka waktu penyesuaian tiap-tiap tugas, dengan jalan memonitoring setiap peluang waktu yang ada bagi penyesuaian tugas dalam jaringan kerja.

c. Pendekatan Kepribadian

Pendekatan kepribadian adalah suatu pendekatan yang lebih memusatkan pada sifat-sifat perilaku masyarakat terhadap suatu kebijaksanaan yang seringkali terjadi penolakan. Adanya penolakan ini mungkin disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap kebijaksanaan yang dibuat. Oleh karena itu harus dijelaskan sejak awal tentang alasan, tujuan, dan sasaran yang diperlukan serta musyawarah

sehingga dapat memberikan pengertian yang mendalam dan akhirnya akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

d. Pendekatan Politik (*Polotical Approach*)

Pendekatan politik adalah bahwa keberhasilan dari suatu kebijaksanaan pada akhirnya akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok berpengaruh (koalisi dari kelompok ini) untuk memaksakan kehendaknya, dengan kata lain pendekatan ini adalah mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruhnya di dalam lingkungan organisasi.

5. Proses Implementasi Program

Proses implementasi suatu kebijakan publik menurut Widodo (2013:90-94) yang mencakup tahap interpretasi (*interpretation*), tahap pengorganisasian (*To Organized*), dan tahap aplikasi (*application*).

a. Tahapan Interpretasi (*interpretation*)

Tahapan Interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategic policy*) akan dijabarkan ke dalam kebijakan manajerial (*managerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis operasional (*operasional policy*). Kebijakan umum atau kebijakan strategis diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang dibuat bersama-sama antara lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah). Kebijakan manajerial diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan kepala daerah

(bupati/walikota) dan kebijakan teknis operasional diwujudkan dalam bentuk kebijakan teknis operasional diwujudkan dalam bentuk kebijakan kepala dinas, kepala badan atau kepala kantor, sebagai unsur pelaksana teknis pemerintah daerah.

Aktifitas interpretasi kebijakan tadi tidak sekedar menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat lebih operasional tetapi juga diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan (sosialisasi) agar seluruh masyarakat (*stakeholder*) dapat mengetahui apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan tadi. Kebijakan ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar mereka yang terlibat, baik langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan tadi. Tidak saja mereka menjadi tahu dan paham tentang apa yang menjadi arah, tujuan, dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan.

b. Tahap Pengorganisasian (*to Organized*)

Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya); penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggung jawabkan); penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, penetapan tatakerja; dan penetapan manajemen pelaksanaan

kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.

c. Pelaksana Kebijakan (*Policy Implementor*)

Pelaksana kebijakan (*policy implementors*) sangat tergantung kepada jenis kebijakan apa yang akan dilaksanakan, namun setidaknya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dinas, badan, kantor, unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan pemerintah daerah.
2. Sektor swasta
3. Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
4. Komponen masyarakat

Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar penetapan lembaga mana yang melaksanakan dan siapa saja yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.

d. Standar Prosedural Operasi (*Standard Operating Procedure*)

Setiap melaksanakan kebijakan perlu ditetapkan (*Standard Operating Procedure*) (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, dan referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang harus disiapkan dan lakukan, siapa sasaran, dan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, SOP dapat pula digunakan untuk mencegah timbulnya perbedaan dalam sikap dan bertindak ketika dihadapkan pada permasalahan pada saat mereka melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu,

setiap kebijakan yang dibuat perlu dibuat prosedur tetap (Protab) atau prosedur baku berupa standar prosedur operasi dan atau standar pelayanan minimal (SPM).

e. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Setelah ditetapkan siapa yang menjadi perilaku kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP), langkah berikutnya perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan dari mana sumber anggaran tadi, serta peralatan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Berdasarkan anggaran untuk melaksanakan kebijakan tentunya sangat tergantung kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun sumber anggaran setidaknya dapat ditetapkan antara lain berasal dari pemerintah pusat (APBN), APBD, sektor swasta, swadaya masyarakat, dan lain-lain. Demikian pula macam, jenis, dan besar kecilnya peralatan yang diperlukan sangat bervariasi dan tergantung pada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Meskipun demikian, yang lebih penting untuk diketahui dan ditegaskan adalah untuk melaksanakan kebijakan perlu didukung oleh peralatan yang memadai. Tanpa peralatan yang cukup dan memadai akan dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan.

f. Penetapan Manajemen Pelaksana Kebijakan

Manajemen pelaksana kebijakan dalam hal ini lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu

lembaga (pelaku kebijakan) maka harus tegas dan jelas pola kepemimpinan yang digunakan pola kolegal, atau ada salah satu lembaga yang ditunjuk sebagai koordinator. Bila ditunjuk salah satu diantara pelaku kebijakan untuk menjadi koordinator biasanya lembaga yang terkait erat dengan pelaksana kebijakan yang diberi tugas sebagai laeding sector bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

g. Penetapan Jadwal Kegiatan

Agar kinerja pelaksanaan kebijakan menjadi baik setidaknya dari “dimensi proses pelaksanaan kebijakan”, maka perlu adanya penetapan jadwal pelaksanaan kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan tadi harus diikuti dan dipatuhi secara konsisten oleh para pelaku kebijakan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak saja dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus dapat dijadikan sebagai standar untuk menilai kinerja pelaksanaan kebijakan, terutama dilihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kebijakan perlu ditegaskan dan disusun jadwal pelaksanaan kebijakan.

h. Tahap Aplikasi (*Aplication*)

Tahapan aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

D. Smart Kampung

Smart kampung ada ketika konsep *smart city* sudah banyak diterapkan diberbagai kota-kota di Indonesia. *Smart city* atau secara harfiah berarti kota pintar, merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan disuatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Tujuan dari pendekatan *smart city* untuk mencapai informasi dan pengelolaan kota yang terintegrasi. Integrasi ini dapat melalui manajemen jaringan digital geografi perkotaan, sumber daya, lingkungan, ekonomi, social, dan lainnya.

Menurut Supangat (2014 : 25) *smart city* adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas, intinya *smart city* menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan kota yang lebih efisien. Tujuan-tujuan pembangunan perkotaan berkelanjutan dapat dicapai secara sistematis dan bertahap dengan perspektif jangka panjang.

Menurut Nurmadi (2013 : 35) kota cerdas atau *smart city*, pada umumnya didasarkan pada 3 hal :

1. Faktor manusia, kota dengan manusia-manusia yang kreatif dalam pekerjaan, jejaring pengetahuan, lingkungan yang bebas dari kriminal.
2. Faktor teknologi, kota yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi.
3. Faktor kelembagaan, masyarakat kota (pemerintah, kalangan bisnis dan penduduk) yang memahami teknologi informasi dan membuat keputusan berdasarkan pada teknologi informasi.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *smart city* merupakan sebuah konsep kota cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya. *Smart village* atau kampung pintar adalah konsep perencanaan kampung dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Beberapa ahli menganggap konsep kota dengan *smart village* dapat memenuhi kebutuhan akan kemudahan hidup, walaupun pada kenyataannya konsep *smart village* masih dalam perdebatan oleh para ahli dan belum ada definisi dan konsep umum yang bisa diterapkan disemua kampung didunia. Konsep *smart village* masih bergantung pada kota dan pengembangan masing-masing.

Menurut peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart* Kampung Mendefinisikan *Smart* Kampung sebagai berikut :

“*Smart* Kampung adalah konsep pengembangan masyarakat dalam suatu komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan efisiensi di suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang membentuk komunitas sendiri dengan tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya”.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghadirkan suatu inovasi berupa *Smart* Kampung dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan public kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik, untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara terpadu.

Sasaran dari *Smart* Kampung yaitu dapat dilaksanakan di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi secara bertahap. Pelaksanaan secara bertahap diprioritaskan pada desa dan kelurahan yang telah memenuhi kualifikasi. Adapun kualifikasi yang harus dipenuhi oleh desa/kelurahan antara lain :

- b. Sarana, berupa :
 - i. Balai atau ruangan yang memadai
 - ii. Meleber (meja,kursi,almari,dan lain-lain)
 - iii. Sound sistem
 - iv. LCD projector
 - v. Papan pengumuman/informasi
 - vi. Sarana bermain dan belajar untuk anak-anak
- c. Prasarana, berupa :
 - i. Listrik
 - ii. Air bersih dan sanitasi
 - iii. Toilet bersih
 - iv. Tempat sampah
 - v. Media cetak (koran, majalah, dan lain-lain)
 - vi. Penghijauan (pohon, bunga, dan lain-lain)
 - vii. Perpustakaan desa
 - viii. Jaringan/koneksi teknologi informasi (internet)

- d. Sumber daya manusia, terdiri dari pejabat/pegawai/staf/petugas di desa/kelurahan yang diberi pelatihan/pendampingan dan pembinaan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

E. Konsep *Smart* Kampung Kabupaten Banyuwangi

Smart Kampung mempunyai konsep yang bertujuan untuk percepatan pelayanan publik di desa/kelurahan. Demi menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik terdapat 7 fokus yang diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yaitu :

1. Pelayanan publik

Semua desa/kelurahan yang telah menerapkan inovasi *Smart* Kampung sudah berbasis TIK. Warga yang butuh surat yang perlu tanda tangan camat, tidak perlu ke kecamatan. Cukup di balai desa, karena sudah tersambung dengan kecamatan.

2. Pemberdayaan ekonomi

UMKM di desa diberi pelatihan teknis yang nantinya pemasaran bisa berbasis online di situs belanja UMKM yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui banyuwangi-mall.com. *Smart* Kampung juga jadi instrument untuk mempercepat inklusi keuangan alias membuat warga makin melek keuangan yang akan disinergikan dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

3. Kesehatan

Balai desa menjadi jangkar bagi posyandu sekaligus memberikan rujukan yang memudahkan warga miskin dalam memperoleh surat yang akan digunakan untuk pengobatan.

4. Kemiskinan

Di bidang kemiskinan, *Smart* Kampung memudahkan warga miskin dalam mengurus segala keperluannya yang dijamin oleh pemerintah.

5. Informasi hukum

Smart Kampung mendorong warga desa agar melek hukum dengan cara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selalu melakukan sosialisasi intensif ke desa-desa tentang semua yang berkaitan tentang hukum, sebagai upaya preventif dan penanganan cepat kasus pelanggaran hukum.

6. Pendidikan, seni dan budaya

Pada bidang pendidikan, desa menjadi pendorong penuntasan wajib belajar 12 tahun. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengarahkan Relawan Banyuwangi Mengajar, yaitu para alumnus baru perguruan tinggi, ke desa. Desa juga harus punya Perpustakaan Desa. Sedangkan dibidang seni dan budaya, balai desa menjadi simpul bagi aktivitas seni warga. Sanggar-sanggar seni berlatih bersama, mulai dari seni tari, musik, sampai pencak silat menyesuaikan dengan potensi dan minat warga desa.

7. Peningkatan kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui berbagai macam pelatihan. Seperti pelatihan bahasa, tanggap bencana, mengaji, hingga TIK yang dipusatkan di bali desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2014:9), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara histolik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan dalam konteks khusus yang di alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Sugiono (2016:9), merode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawan adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data sebagai induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna dari pada generalisasi.

Jadi penelitian kualitatif penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dan dalam konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan kata di lakukan secara

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2016:9)

Dalam kualitatif kadar ke ilmiahnya sebuah karya dapat dilihat dari kadar subjektivitas penelitian dalam memaknai (membaca) realitas menurut teropong yang telah ditetapkan peneliti dengan informasi. Kedekatan peneliti dengan informan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengungkap realita secara mendalam (Moleong, 2014:9).

Jenis penelitian ini juga merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu, sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan demikian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mampu menggambarkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di Kabupaten Banyuwangi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus penelitian adalah garis besar dari penelitian, jadi observasi serta analisa hasil penelitian akan lebih terarah (Sugiyono, 2011). Fokus dalam penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yaitu meliputi:

1. pemberdayaan ekonomi masyarakat (Hutomo, 2014) :

- a. Memberikan bantuan motivasi moril dengan bentuk-bentuk motivasi moril itu adalah:
 - 1) Pelatihan Usaha.
 - 2) Permodalan.
 - b. Pendidikan, dalam hal ini yaitu mengenai:
 - 1) Pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu.
 - 2) Penyediaan sarana dan prasarana.
2. Aktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *Smart* Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, yaitu meliputi (Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2016 tentang Integritas Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart* Kampung)
- a. Pemerintah daerah
 - b. PT. Telkom, Tbk
 - c. Masyarakat yang berpartisipasi dalam program *Smart* Kampung.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
- a. Faktor pendukung
 1. Faktor internal, adanya dukungan dari aparat desa yang memiliki komitmen terhadap sistem pengelolaan desa dan sarana serta prasarana
 2. Faktor eksternal, pihak swasta yang memberikan dukungan pelaksanaan program.
 - b. Faktor penghambat.

1. Faktor internal, komitmen pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk peraturan perundang-undangan masih kurang dan aktivitas dalam pelaksanaan program tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
2. Faktor eksternal, jaringan internet yang digunakan untuk program Smart Kampung

C. Lokasi dan Situs

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti untuk melakukan penggalian data dan informasi. Sesuai dengan judul penelitian ini maka pengambilan informasi dan data dilakukan di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan kabupaten terluas di wilayah Jawa Timur dan Banyuwangi terdiri dari 28 kelurahan dan 189 desa yang tersebar di 24 kecamatan. Dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi karena berbasis pada desa/kelurahan, termasuk infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang masih minim dan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang minim sehingga perlu ditingkatkan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencetuskan program *smart* kampung sejak tahun 2016 sebagai upaya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Adapun situs adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti guna memperoleh data. Dalam penelitian ini situs penelitian di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dengan pertimbangan bahwa desa tersebut sebagai salah satu desa

pilot project program *smart* kampung dengan pertimbangan bahwa peneliti dapat menemukan dan memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian.

D. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2016:89), bila di lihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data primer di dapat melalui wawancara atau pengamatan hasil kegiatan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada aparaturnya yang berwenang dalam pelaksanaan program *smart* kampung. Data primer ini merupakan jawaban berupa opini yang objektif berupa keterangan pribadi narasumber kepada peneliti. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu berasal dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak yang digunakan sebagai sumber data penelitian, dalam hal ini yaitu:
 - a. Pemerintah Kabupaten Bayuwangi dalam hal ini yaitu KASI (Kepala Seksi) Aset dan Keuangan Desa DPM (Dinas Pemberdayaan Masyarakat)-Desa Kabupaten Banyuwangi.
 - b. Pemerintah desa dalam hal ini yaitu:
 1. Kepala Desa Ketapang
 2. Sekretaris Desa Ketapang
 3. Kepala Urusan Keuangan Desa Ketapang

4. Pegawai Desa Ketapang yang memiliki tugas dalam membeikan pelayanan program *smart* kampung di Desa Ketapang
 - c. Masyarakat Desa Ketapang yang paham dan mengerti tentang program Smart Kampung dalam hal ini adalah paguyuban dan pemilik UMKM.
 - d. Pihak swasta yang dilibatkan sebagai pendukung program *smart* kampung di Desa Ketapang.
2. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen seperti profil monografi dan dokumen atau arsip berkaitan lainnya. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini berupa dokumen yang telah tersedia dalam lembaga atau instansi yang berhubungan dengan fokus dalam penelitian yang ada pada Kantor Desa Desa Ketapang dan Pemerintah Kabupaten sumber data dalam penelitian ini antara lain adalah:
 - a. Gambaran umum tentang Kabupaten Banyuwangi sebagai fokus penelitian, serta Desa Ketapang sebagai situs penelitian yang dipilih oleh peneliti, yang berisi setidaknya tentang gambaran umum lokasi dan situs penelitian, visi dan misi, struktur organasasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
 - b. Laporan kinerja dan dasar hukum yang mendasari implementasi program *smart* kampung
 - c. Gambaran *Smart* Kampung oleh Pemeritah Daerah dalam hal ini bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyuwangi

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Berkaitan dengan observasi dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat penelitian juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang cari merupakan data yang masih dirahasiakan. Pengertian Observasi menurut Supriyati (2011:46) yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di Desa Ketapang di Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui bentuk nyata dari pelaksanaan program *smart* kampung sebagai upaya pembedayaan ekonomi masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan observasi non-partisipan, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkannya tanpa menjadi bagian dari situasi yang terjadi. Peneliti memang hadir secara fisik di tempat kejadian, namun hanya mengamati serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap informasi yang diperolehnya. Observasi jenis ini harus dilakukan dalam suatu periode yang panjang agar seluruh data yang

dibutuhkan benar-benar terkumpul secara lengkap, sehingga memakan waktu yang cukup lama.

2. Wawancara

Wawancara menurut Esterbeg (2000) dalam buku Sugiyono (2016:231) adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Susan Stainback (1988) dalam buku Sugiyono (2016:232) menjelaskan wawancara adalah peneliti akan mengetahui ha-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan sumber informasi. Sumber informasinya berupa orang (narasumber) yang merupakan sumber data yang berjenis data primer, pada metode ini peneliti berhadapan langsung (tatap muka) dengan narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan bagian koordinasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di Desa Ketapang di Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini kepada pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta. Proses wawancara

dilakukan selama dua hari yang dilakukan secara langsung di Desa Ketapang dengan menggunakan media perekam dan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah terlampir.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2008:240). Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data sekunder yang digunakan untuk menambah ulasan atau pembahasan dari hasil yang diperoleh dari lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dokumen yang di dapat dari lokasi penelitian untuk kemudian dipelajari dan memasukkannya ke dalam hasil penelitian apabila memiliki keterkaitan dengan hal yang sedang diteliti.

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mengenai gambaran umum tentang Kabupaten Banyuwangi sebagai fokus penelitian, serta Desa Ketapang sebagai situs penelitian yang dipilih oleh peneliti, yang berisi setidaknya tentang gambaran umum lokasi dan situs penelitian, visi dan misi, struktur organisasi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Arsip-arsip, dokumen-dokumen, dan berbagai dasar hukum yang mendasari implementasi program *smart* kampung dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta terkait dengan informasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung, aktor yang terlibat dan faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiono, 2016:222). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Peneliti Sendiri

Peneliti adalah instrumen utama dalam sebuah penelitian kualitatif karena seorang peneliti merupakan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data analisis, penafsiran data dan laporan hasil dari penelitian tersebut.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan sebagai petunjuk umum wawancara dengan membuat kerangka dan garis-garis besar pokok permasalahan yang ditanyakan dalam proses wawancara. Dalam penelitian ini peneliti membuat kerangka dan garis-garis besar tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *Smart* kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

3. Catatan Lapangan

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari buku catatan, kamera, recorder, dan dokumen-dokumen tertulis dari instansi yang ada dilokasi penelitian yang mendukung dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mendapat data-data dari desa Ketapang yang bersangkutan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti monografi dan juga foto-foto tentang pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *Smart* kampung.

4. Perangkat Penunjang Perangkat penunjang, yaitu berupa alat yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data, seperti buku, alat tulis, alat perekam, kamera, maupun alat bantu lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat tulis, alat perekam dan juga kamera untuk mendapatkan data tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *Smart* kampung.

G. Teknik Analisis Data

Miles, Huberman dan Saldana (2014:10) menyebutkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang menggunakan sudut pandang peneliti sebagai alat analisis utama. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna dari berbagai aspek yang ditemui dengan mengkaji pendapat, pemikiran, persepsi dan interpretasi dari pihak-pihak yang dianggap kompeten terhadap masalah penelitian. Analisis data dilakukan secara induktif, dan penularannya didasarkan pada data yang cenderung bersifat verbal.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Langkah yang dilakukan sebelum di lapangan ialah analisis dilakukan terhadap data hasil pendahuluan, atau data primer, yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Analisis data yang digunakan selanjutnya ialah analisis selama di lapangan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas yang meliputi:

1. Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Pada tahap pertama, peneliti mengumpulkan data yang telah ditentukan sejak awal yang melibatkan aktor, aktifitas dan terjadinya fenomena. Proses pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data, diartikan proses pemilihan, penyederhanaan dan transparansi data yang di dapat dari lokasi penelitian, kondensasi data ini dapat dilakukan sebelum mendapatkan keseluruhan dari semua data yang dicari dan kondensasi ini dilakukan terus menerus. Kondensasi data dilakukan dengan cara menjabarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian secara lengkap dan terperinci. Laporan lapangan disederhanakan dan dipilih hal-hal yang penting atau pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari polanya. Hal ini dilakukan secara

terus menerus hingga penelitian selesai. Proses kondensasi yaitu dengan melakukan meringkas dari hasil wawancara sehingga dapat digunakan untuk mendukung penentuan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti meringkas data yang sudah didapat dengan cara wawancara untuk menentukan kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *Smart* kampung.

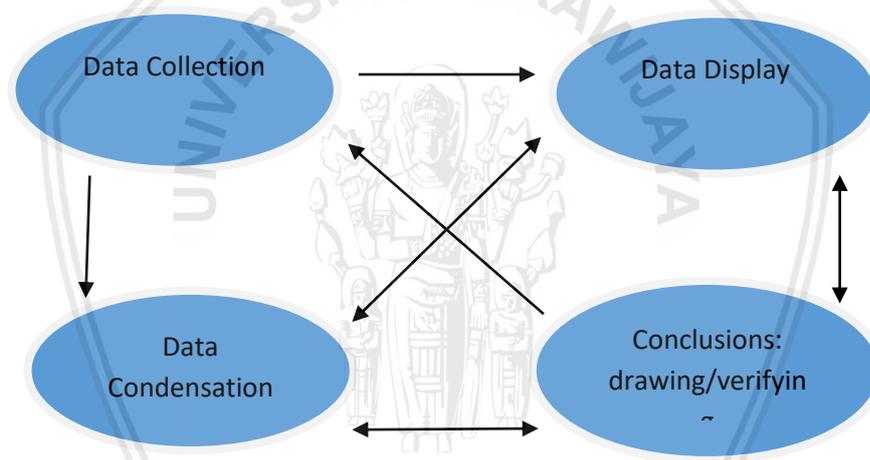
3. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian Data adalah susunan data yang terorganisasi dan dalam sebuah pola yang mudah dipahami sehingga memungkinkan pencarian kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Proses penyajian data dilakukan untuk menetapkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan uraian singkat tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *Smart* kampung.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/ verification*)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal tapi juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara sehingga peneliti dapat menemukan perkembangan ditempat penelitian. Kesimpulan diperoleh dari proses wawancara yang dilakukan sesuai dengan topic atau tema yang diajukan. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah

dengan mencatat pola dan tema yang sama, mengelompokkan, dan mencari kasus yang berbeda, khas atau menyimpang dari kebiasaan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menentukan kesimpulan dengan melihat data yang didapatkan dilapangan dengan menyandingkan dengan teori yang digunakan lalu ditentukan kesimpulan yang didapat tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *Smart* kampung. Analisis data model Miles, Huberman dan Saldana dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014:33)

H. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, menurut Menurut Sugiyono (2009:14) yaitu merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (sebagi lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan

sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snohaal*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pengujian keabsahan data meliputi:

1. Uji Kreadibilitas (*Creadibility*)

Uji kreadibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi atau pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara (baik triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu), dan diskusi dengan teman sejawat.

2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam suatu penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.”

3. Uji Reabilitas (*Reability*)

Penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji reabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa, “jika peneliti tidak mempunyai dan tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas di lapangannya, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.”

4. Uji Obyektivitas (*Confirmability*)

Penelitian dikatakan obyektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

1. Sejarah Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan data sejarah nama Banyuwangi tidak dapat terlepas dengankerajaan Blambangan. Sejak jaman Pangeran Tawang Alun (1655-1691) dan Pangeran Danuningrat (1736-1763), bahkan juga sampai ketika Blambangan berada di bawah perlindungan Bali (1763-1767), VOC belum pernah tertarik untuk memasuki dan mengelola Blambangan (Ibid.1923 :1045). Pada tahun 1743 Jawa Bagian Timur (termasuk Blambangan) diserahkan oleh Pakubuwono II kepada VOC, VOC merasa Blambangan memang sudah menjadi miliknya. Namun untuk sementara masih dibiarkan sebagai barang simpanan, yang baru akan dikelola sewaktu-waktu, kalau sudah diperlukan. Bahkan ketika Danuningrat memina bantuan VOC untuk melepaskan diri dari Bali, VOC masih belum tertarik untuk melihat ke Blambangan.

Namun barulah setelah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan dan mendirikan kantor dagangnya (komplek Inggris sekarang) pada tahun 1766 di bandar kecil Banyuwangi (yang pada waktu itu juga disebut Tirtaganda, Tirtaarum atau Toyaarum), maka VOC langsung bergerak untuk segera merebut Banyuwangi dan mengamankan seluruh Blambangan. Secara umum dalam peperangan yang terjadi pada tahun 1767-

1772 (5 tahun) itu, VOC memang berusaha untuk merebut seluruh Blambangan. Namun secara khusus sebenarnya VOC terdorong untuk segera merebut Banyuwangi, yang pada waktu itu sudah mulai berkembang menjadi pusat perdagangan di Blambangan, yang telah dikuasai Inggris.

Dengan demikian jelas, bahwa lahirnya sebuah tempat yang kemudian menjadi terkenal dengan nama Banyuwangi, telah menjadi kasus-beli terjadinya peperangan dahsyat, perang Puputan Bayu. Kalau sekiranya Inggris tidak bercokol di Banyuwangi pada tahun 1766, mungkin VOC tidak akan buru-buru melakukan ekspansinya ke Blambangan pada tahun 1767. Dan karena itu mungkin perang Puputan Bayu tidak akan terjadi (puncaknya) pada tanggal 18 Desember 1771. Dengan demikian pasti terdapat hubungan yang erat perang Puputan Bayu dengan lahirnya sebuah tempat yang bernama Banyuwangi. Dengan perkataan lain, perang Puputan Bayu merupakan bagian dari proses lahirnya Banyuwangi. Karena itu, penetapan tanggal 18 Desember 1771 sebagai hari jadi Banyuwangi sesungguhnya sangat rasional.

2. Visi Misi Kabupaten Banyuwangi

Terwujudnya masyarakat banyuwangi yang sejahtera, aman, berbudaya, berkeadilan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dalam rangka mewujudkan **‘Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Mandiri,Sejahtera dan Berakhlak Mulia Melalui PeningkatanPerekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia’**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah kabupaten banyuwangi memiliki misi tersebut:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
- b. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan
- c. kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan.
- e. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.
- f. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
- g. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa.
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.

- i. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- j. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara,berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakanperaturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

3. Letak Geografis Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi terletak diantara $7^{\circ}43'$ – $8^{\circ}046'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}53'$ – $114^{\circ}38'$ Bujur Timur. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo
2. Sebelah Timur : Selat Bali
3. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
4. Sebelah Barat : Kabupaten Jember dan Bondowoso

Untuk lebih jelasnya mengenai batas administratif Kabupaten Banyuwangi dapatdilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km² yang merupakan daerah kawasan hutan yang mencapai luas 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%, persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44% perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%, permukiman dengan luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04% sisanya dipergunakan untuk jalan, ladang dan lain-lainnya. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Kondisi topografi Kabupaten Banyuwangi, bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah, tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40⁰. Dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibandingkan dengan bagian wilayah lainnya.

Dataran yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15⁰ dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah. Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara dimana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap lingkungan terhadap tingkat kesuburan tanah. Disamping potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi

merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber baru perekonomian rakyat. Dengan bentangan pantai yang cukup panjang, dalam perspektif ke depan, Pengembangan sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi pengelolaan kawasan pantai dan perairan laut.

4. Gambaran Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Desa Ketapang mencakup wilayah yang cukup luas di mana pesisir pantainya berupa pelabuhan dan kawasan industri, sedangkan semakin ke barat adalah wilayah hutan dengan gugusan bukit kapur. Desa ini dilewati saat melintasi Jalur Pantura Banyuwangi-Situbondo. Wilayah pelabuhan ini mulai dibangun pada dekade 1980-an saat otoritas pelabuhan Indonesia, Pelindo III menemukan lokasi yang akhirnya disebut Tanjung Wangi ini lebih cocok untuk didirikan pelabuhan besar dibandingkan dengan area Pelabuhan Boom yang sangat dekat dengan Kota Banyuwangi.

Selain Pelabuhan Tanjung Wangi (Pelabuhan Meneng), ada juga Pelabuhan Ketapang yang menjadi penghubung Pulau Jawa dan Bali dengan moda transportasi kapal feri. Karena ada pelabuhan ini, di bagian pesisir Desa Ketapang mulai berdiri beberapa pabrik-pabrik maupun gudang industri (seperti halnya di Bulusan dan Klatak), seperti misalnya Terminal Aspal Curah, Bulog Pergudangan Ketapang I dan II, Semen Gresik, dan Djakarta Lloyd. Selain itu

di area ini juga berdiri Pangkalan TNI AL (Lanal) Banyuwangi. Untuk mendukung keberadaan pelabuhan juga dibangun fasilitas transportasi lain seperti Stasiun Banyuwangi Baru dan Terminal Sritanjung. Sedangkan bagian barat desa diisi dengan perkampungan warga dan hutan dengan gugusan bukit kapur. Beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi di desa ini seperti Gua Jepang, Pemandian Penawar dan Sunrise Villa di mana di tempat tersebut cocok untuk melihat matahari terbit di pagi hari, dan Pantai Watu Dodol. Karena adanya destinasi wisata ini, selain alasan lain berhubungan dengan Pulau Bali, maka di desa ini juga banyak berdiri hotel-hotel seperti Hotel Manyar, Hotel Banyuwangi Beach, Hotel Watudodol dan beberapa hotel lainnya. Selain hotel juga terdapat restoran dan cafe, seperti Restoran Grafika, Restoran Watudodol, Ikan Bakar, Laggallus dan Green Diamond Cafe.

Desa ini dilewati oleh Jalan Gatot Subroto, di mana jalan ini menjadi jalan poros areal pelabuhan dan lintas Banyuwangi-Situbondo. Selain itu ada juga Jalan Lingkar Ketapang (*Ketapang Ringroad*) yang berguna saat terjadi kemacetan di Jalan Gatot Subroto, sehingga dilakukan pengalihan arus kendaraan antara Banyuwangi-Situbondo atau sebaliknya dan Jalan Gatot Subroto hanya digunakan sebagai akses menuju ke Pelabuhan Ketapang. Di ujung timur Jalur Pantura ini juga terdapat Pantai Watu Dodol yang ditandai dengan patung Gandrung dan batu besar menjulang tinggi di tengah-tengah jalan dan membagi jalan menjadi dua. Lalu, tidak jauh dari Pantai Watu Dodol terdapat Jembatan Timbang Watudodol.

Penduduk Desa Ketapang beragam, terbagi atas Suku Madura, Suku Osing, Suku Jawa, Suku Bali dan lainnya. Adanya Penduduk dari Suku Madura ini dikarenakan letak Desa Ketapang yang berdekatan dengan Kecamatan Wongsorejo yang mayoritas penduduknya dari Suku Madura dan karena terhubung langsung dengan gerbang Pulau Bali maka banyak warga Bali yang mendiami desa ini sebagai pemilik usaha hotel dan restoran maupun tinggal biasa.

Berdasarkan data tahun 2016, desa yang luas wilayahnya sebesar 24,51 % dari luas keseluruhan kecamatan ini, berpenduduk sejumlah 16.550 jiwa, yang terdiri dari 8.202 laki-laki dan 8.348 perempuan. Artinya desa ini memiliki rasio jenis kelamin sebesar 98,26. Jumlah penduduk ini terdiri dari komposisi 4.106 jiwa usia 0-14 tahun, 3.988 jiwa 15-29 tahun, 4.134 jiwa 30-44 tahun, 2.918 jiwa 45-59 tahun dan 1.396 jiwa 60 tahun ke atas. Pekerjaan warga juga beragam, seperti karyawan industri, pegawai yang bekerja di Kota Banyuwangi, operator pelabuhan, PNS dan nelayan dengan angka di bidang pertanian sebanyak 1.150 jiwa, perkebunan sebanyak 338 jiwa, kehutanan (372 jiwa), perikanan (101 jiwa), peternakan (1633 jiwa), pertambangan (23 jiwa), industri (883 jiwa), perdagangan (912 jiwa) dan sektor jasa sebanyak 451 jiwa.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Smart Kampung merupakan program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan teknologi informasi berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Banyuwangi telah membentuk 23 desa dan 18 kelurahan yang menjadi *pilot project Smart* Kampung dan saat ini sedang disiapkan untuk 176 desa lainnya. (Banyuwangikab.go.id). Bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *Smart* Kampung dapat ditunjukkan dari beberapa upaya pemberdayaan yang terkait dengan peningkatan kondisi perekonomian masyarakat. Sesuai dengan fokus penelitian maka bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Memberikan Bantuan Motivasi Moril

Bentuk-bentuk bantuan motivasi moril tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Pelatihan usaha

Secara nyata bentuk-bentuk Pelatihan Usaha melalui program *smart* kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan memberikan pelatihan usaha kepada pemilik usaha atau UMKM dengan harapan memiliki kemampuan dalam pengelolaan usaha yang lebih baik. Hasil wawancara terkait dengan kegiatan pelatihan usaha dapat ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Arifin selaku Bagian Kesra yaitu sebagai berikut:

Selama ini berbagai bentuk pelatihan dilakukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, dimana masyarakat mendapatkan berbagai bentuk pelatihan sehingga aktivitas

pemberdayaan masyarakat dapat dimaksimalkan. Selama ini aktivitas pelatihan yang dilakukan juga didukung oleh berbagai fasilitas fisik sehingga aktivitas pelatihan dapat secara maksimal dilakukan (Wawancara Bapak Syamsul Arifin, tanggal 15 Januari 2019, pukul 11.45 WIB)

Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara dengan kepala bagian dinas pemberdayaan masyarakatdesa yaitu Ibu Ida selaku kepala bagian dinas pemberdayaan masyarakatdesayaitu sebagai berikut:

Berbagai kemudahan saya dapatkan selaku masyarakat dalam upaya untuk pelaksanaan aktivitas sehari-hari, selain itu terkait dengan aktivitas yang dilakukan terutama mengenai upaya peningkatan kualitas usaha yang dilakukan(Wawancara Ibu Ida, tanggal 16 Januari 2019, pukul 12.30 WIB)

Beliau juga menambahkan bahwa:

Kegiatan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat yaitu berupa pelatihan kewirausahaan, yaitu terkait dengan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi serta pelatihan terkit dengan efisiensi usaha yang dilakukan. Bentuk pelatihan lainnya yaitu terkait dengan proses pengelolaan usaha yang dilakukan, dimana bentuk pelatihan yang diberikan yaitu mengenai administrasi pengelolaan usaha serta kiat-kiat dalam upaya memaksimalkan usaha. Terkait dengan peserta pelatihan yang dilakukan yaitu sebanyak 30-40 perserta pemilik usaha (Wawancara Ibu Ida, tanggal 16 Januari 2019, pukul 12.30 WIB)

Bapak Dimas selaku staff desa bagian pengelolaan *smart* kampung menyatakan sebagai berikut:

Bentuk nyata dari pelaksanaan program smart kampung yaitu dengan memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha yang bertujuan untuk memberikan dukungan agar pengelolaan usaha yang dilakukan lebih professional serta memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang benar sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang(Wawancara Bapak Dimas, tanggal 13 Januari 2019, pukul 13.20 WIB)

Selain itu beliau juga memberikan pernyataan terkait dengan aktivitas kegiatan pelatihan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

Kegiatan pelatihan yang kami berikan yaitu dengan memberikan pelatihan secara eksternal dan internal. Pelatihan secara internal dilakukan dengan menggunakan tenaga pelatih atau trainer dari pengelola program smart kampung sedangkan dari eksternal yaitu berasal dari lembaga pelatihan yang berkompeten dibidang pengembangan usaha. Selain itu pelatihan juga dilakukan dalam rangka upaya penguasaan pemanfaatan teknologi untuk mendukung aktivitas usaha yang dijalankan. Kegiatan pelatihan sudah menjadi agenda rutin, dimana pelaksanaannya yaitu sebanyak 2-3 dalam 1 tahun sedangkan apabila terjadi kebutuhan yang mendesak untuk disampaikan kepada peserta pelatihan maka waktu menyesuaikan atas kegiatan yang dilakukan (Wawancara Bapak Dimas, tanggal 13 Januari 2019, pukul 13.20 WIB)

Salah satu bentuk pelatihan yang dilakukan dalam program *smart* kampung dapat ditunjukkan pada Gambar berikut:



Gambar 4.2 Bentuk pelatihan Usaha Pembuatan Piring Lidi

Hasil wawancara dan hasil dokumentasi menunjukkan bahwa dalam

pelaksanaan program *smart* kampung selama ini bentuk aktivitas nyata yang dilakukan dengan melakukan atau melaksanakan kegiatan pelatihan usaha sehingga mendukung aktivitas pengembangan ekonomi masyarakat. Supaya lebih meningkatkan kemampuan usaha maka dilakukan juga pelatihan dalam penggunaan sarana dan prasarana dilengkapi *software* dan *hardware* yang memadai tetapi warga masyarakat juga menjadi lebih maju dan mandiri karena

mampu menguasai teknologi sistem informasi dengan adanya program ini. Dan adanya program *smart* kampung ini pelayanan administrasi di kantor desa menjadi lebih tepat, mudah dan efisien, juga dengan adanya *smart* kampung ini dapat mengurangi adanya pungli dengan pelayanan yang memanjakan dan memangkas biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Masyarakat juga dapat mengurus kebutuhan akan pelayanan administrasi dengan sarana aplikasi untuk pribadi dan masyarakat juga membutuhkan sosialisasi serta pembelajaran berupa pelatihan tentang cara pengoperasian sistem aplikasi desa untuk dapat mengurus data yang dibutuhkan oleh mereka dengan memberikan pengawasan atau bimbingan kepada warga masyarakat.

2) Permodalan

Pengertian modal adalah barang yang digunakan sebagai bekal/dasar untuk bekerja atau melakukan usaha, baik berupa uang, skill, atau yang lainnya. Modal merupakan satu dari bagian yang cukup penting atau mungkin bisa dikatakan paling penting dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, perusahaan terdiri dari banyak komponen penting dan salah satu komponen penting yang harus ada kaitannya dengan perusahaan ialah modal.

Inti dasar dari suatu usaha agar dapat terus menjalankan kegiatan usahanya adalah dengan adanya modal usaha. Modal merupakan salah satu faktor terpenting dari kegiatan produksi. Bagi usaha yang baru berdiri atau mulai menjalankan usahanya, modal digunakan untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, sedangkan bagi perusahaan atau bidang usaha maupun bisnis yang sudah

berdiri lama, modal biasanya digunakan untuk dapat mengembangkan usaha maupun memperluas pangsa pasar dari bisnis dan usaha tersebut. Pemberdayaan masyarakat melalui program *smart* kampung apabila ditinjau dari permodalan memberikan dukungan dalam upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam hal ini terkait dengan pemberian modal usaha, yaitu ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku kepala bagian dinas pemberdayaan masyarakat desa yaitu sebagai berikut:

Upaya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat ditunjukkan dengan adanya upaya peningkatan kemampuan dalam manajerial dalam usaha yang ditunjukkan dengan adanya sistem pengelolaan yang dilakukan. Upaya ini yaitu dengan memberikan pendidikan terkait dengan upaya pelaksanaan aktivitas pengelolaan usaha yang dilakukan dengan basis penggunaan optimalisasi pengelolaan usaha, yaitu dengan memberikan bantuan permodalan usaha. Kebijakan ini sangat membantu kami dimana modal usaha sering menjadi kendala dalam proses pengembangan usaha yang kami lakukan. Mengenai jumlah bantuan modal yang diberikan kepada pemilik usaha yaitu tergantung besar kecilnya usaha yang dilakukan, dimana besarnya modal yang diberikan yaitu berkisar antara Rp.2.000.000,- sampai Rp.6.000.000 per usaha (Wawancara Ibu Ida, tanggal 16 Januari 2019, pukul 12.30 WIB)

Beliau juga mengatakan bahwa:

Dalam proses pemberian modal usaha yaitu mekanisme atau alur yang digunakan yaitu pemilik usaha mengajukan modal, kemudian terdapat petugas yang melakukan survey usaha sehingga dapat menetapkan kebijakan jumlah modal yang diberikan secara tepat. Selanjutnya setelah proses pengelolaan modal dilakukan maka langkah selanjutnya pemilik usaha untuk melakukan pengembalian modal setelah proses pemberdayaan modal dilakukan (Wawancara Ibu Ida, tanggal 16 Januari 2019, pukul 12.30 WIB)

Apabila dikaitkan dengan bidang permodalan tersebut maka dapat disajikan penerima modal usaha melalui program *smart* kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2018 total

dana yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp.110.000.000,- dan secara lengkap dapat disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Nama-Nama Penerima Bantuan Modal Usaha Melalui Program *Smart*
Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2018

No.	Nama	Alamat		Jenis Usaha	Jumlah
		Dusun	RT/RW		
1.	Atem	Gunung Remuk	01/01	Perdagangan	5.000.000
2.	Malah	Gunung Remuk	01/02	Peternakan	4.500.000
3.	Sudahlan	Gunung Remuk	02/04	Perdagangan	3.000.000
4.	Malihatun	Gunung Remuk	02/04	Perdagangan	5.000.000
5.	Siti	Gunung Remuk	02/04	Perdagangan	5.000.000
6.	Sundiyah	Gunung Remuk	02/04	Perdagangan	4.000.000
7.	Satimah	Gunung Remuk	04/05	Tambal ban	5.500.000
8.	Miswati	Gunung Remuk	04/05	Perdagangan	6.000.000
9.	Suryan	Krajan	01/01	Perdagangan	5.000.000
10.	Tuminah	Krajan	01/01	Laundry	5.000.000
11.	Jumaiyah	Krajan	01/02	Perdagangan	5.000.000
12.	Sunarto	Krajan	01/02	Perdagangan	5.500.000
13.	Sulastutik	Krajan	02/02	Perdagangan	5.000.000
14.	Saputri	Krajan	01/02	Perdagangan	5.500.000
15.	Marwah	Pancoran	01/01	Perdagangan	3.000.000
16.	Efendi	Pancoran	01/01	Perdagangan	5.000.000
17.	Inayah	Pancoran	02/02	Perdagangan	5.500.000
18.	Busani	Pancoran	02/03	Perdagangan	6.000.000
19.	Misbah	Pancoran	03/03	Perdagangan	7.000.000
20.	Mardiyah	Selogiri	01/01	Perdagangan	4.500.000
21.	Hama	Selogiri	01/02	Perdagangan	5.000.000
22.	Buwang	Selogiri	01/03	Perdagangan	5.000.000
Total					110.000.000

Sumber: Program Pemberdayaan Masyarakat Program *Smart* Kampung di Desa Ketapang, Tahun 2018.

Apabila dikaitkan dengan bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi melalui bidang permodalan dapat ditunjukkan dari wawancara dengan Bapak Dimas selaku staff desa bagian pengelolaan *smart* kampung yaitu sebagai berikut:

Tujuan program smart kampung yaitu sebagai upaya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga keberadaan masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang terbaik sehingga seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimaksimalkan sehingga pemberdayaan seluruh aspek dapat dimaksimalkan demikian pula terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan agenda utama yang harus dicapai dalam proses pelaksanaan program smart kampung, dimana program ini menggali potensi yang dimiliki oleh desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Jadi langkah riil yang kami berikan yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha dengan menggunakan sistem dan prosedur yang mudah sehingga pemilik usaha mendapatkan modal dalam pengembangan usaha yang dijalankan. Dalam pemanfaatan modal yang dilakukan pemilik usaha yaitu untuk pemenuhan pembelian bahan baku serta peralatan usaha serta manfaat lainnya yang digunakan untuk pengembangan usaha yang dijalankan. (Wawancara Bapak Dimas, tanggal 13 Januari 2019, pukul 13.20 WIB)

Pelaksanaan *Smart Kampung* merupakan bentuk atau wujud nyata dalam pelaksanaan dalam program yang telah ditetapkan. Bentuk secara nyata dari pelaksanaan *Smart Kampung* sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Bapak Dimas selaku staff desa bagian pengelolaan *smart* kampung yaitu sebagai berikut:

Selama ini saya merasakan adanya dampak adanya kebijakan Smart Kampung, salah satu bentuk nyatanya yaitu saya mendapatkan kemudahan dalam proses untuk mendapatkan modal usaha, dimana program tersebut menawarkan kemudahan dalam proses untuk

mendapatkan bantuan modal usaha sehingga seluruh potensi yang kami miliki dapat berjalan sesuai dengan harapan(Wawancara Bapak Dimas, tanggal 13 Januari 2019, pukul 13.20 WIB)

Upaya ini sebagai bentuk nyata dari aktivitas pengelolaan potensi masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat. Bentuk pengelolaan atau pemberdayaan masyarakat yaitu ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Bapak Dimas selaku staff desa bagian pengelolaan *smart* kampung sebagai berikut:

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program smart kampung melalui bidang permodalan telah menjadi agenda dari pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, hal ini menjadi penggerak potensi masyarakat dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Bentuk nyata yang dilakukan yaitu dengan memberikan dukungan dalam perolehan modal usaha dengan syarat dan proses pengembalian yang mudah sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan dampak positif dari keberadaan program sebagai upaya peningkatan kesejahterannya (Wawancara Bapak Dimas, tanggal 13 Januari 2019, pukul 13.20 WIB)

Bapak Dimas selaku staff desa bagian pengelolaan *smart* kampung juga menyatakan bahwa:

Kami selaku pengelola desa selalu berupaya memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat serta mendukung upaya untuk pengelolaan potensi desa sehingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat secara maksimal dilakukan dan harus didukung melalui aktivitas permodalan. Dengan memberikan pemahaman usaha yang benar, dan berbagai upaya nyata dilakukan untuk menjadikan masyarakat lebih berkembang terutama dari sektor peningkatan kondisi ekonomi. Kebijakan program melalui aktivitas permodalan menjadi hal penting untuk dilakukan sehingga proses pengelolaan usaha dapat berjalan sesuai dengan ketentuan(Wawancara Bapak Dimas, tanggal 13 Januari 2019, pukul 13.20 WIB)

Terkait dengan tujuan utama dalam pengelolaan program *Smart Kampung* sebagai upaya pengembangan perekonomian masyarakat melalui bidang permodalan yaitu ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Arifin selaku Bagian Kesra yaitu sebagai berikut:

Tujuan program Smart Kampung pada dasarnya merupakan upaya pengelolaan untuk peningkatan potensi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang dijalankan yaitu melalui program pemberdayaan dan tujuan akhir sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu dengan penerapan program tepat guna sehingga masyarakat lebih memahami upaya pemerdayaan dalam bidang ekonomiyadan hal tersebut dapat berjalan melalui kebijakan permodalan yang dilakukan (Wawancara Bapak Syamsul Arifin, tanggal 15 Januari 2019, pukul 11.45 WIB)

Persoalan modal masih menjadi suatu kendala bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkembang. Mereka tidak dapat memenuhi jumlah pesanan atau permintaan konsumen karena kekurangan biaya untuk produksi. Kebijakan dengan memberikan modal usaha pada program *Smart Kampung* menjadikan aktivitas pengelolaan usaha dalam hal ini UMKM dapat berkembang sesuai dengan harapan.

Selain itu Bapak Syamsul Arifin selaku Bagian Kesra juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat program ini juga memberikan bantuan dalam bentuk fisik yaitu dengan memberikan bantuan berupa gerobak untuk usaha. Selain itu melalui program ini juga diberikan bantuan berupa pemberian hewan ternak sebagai upaya untuk peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat (Wawancara Bapak Syamsul Arifin, tanggal 15 Januari 2019, pukul 11.45 WIB)

Adapun dokumentasi dari peberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan gerobak usaha dan pemberian bantuan hewan ternak dapat disajikan pada gambar 4.3 dan 4.4.



Gambar 4.3. Bantuan Berupa Gerobak



Gambar 4.4. Bantuan Berupa Hewan ternak/ Kambing

Hasil wawancara dan dokumentasi tersebut menunjukkan adanya upaya nyata dalam pelaksanaan program *Smart Kampung* untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat tersebut menjadi tujuan dalam pelaksanaan program *smart* kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi melalui bidang permodalan.

3) Pendidikan

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan program *smart* kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pemberian Bea Siswa

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangansumber daya manusia. Karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia untuk menciptakan manusia produktif (Kunaryo, 2000: 21). Pendidikan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dan harus dipastikan sampai ke semua warga negara. Pendidikan merupakan factor penting dalam kehidupan maka arah pendidikan masa depan harus mampu memberikan jalan pemecahan masalah bagi pembangunan yakni tersedianya sumber daya insan yang berkualitas sehingga mampu mengantisipasi setiap perubahan yang cepat dan upaya untuk memaksimalkan potensi pendidikan tersebut dapat didukung dengan biaya pendidikan yang harus dipenuhi dan bagi keluarga yang kurang mampu bea siswa menjadi salah satu solusi dalam pengembangan pendidikan. Adapun nama-nama penerima bea siswa Melalui program *smart* kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 dapat disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Nama-Nama Penerima Bea Siswa Melalui Program *Smart* Kampung di Desa
Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

No.	Nama	Alamat		Jumlah
		Dusun	RT/RW	
1	Sudahlan	Gunung Remuk	02/04	200.000,-
2	Sundiyah	Gunung Remuk	02/04	300.000,-
3	Satimah	Gunung Remuk	04/05	200.000,-
4	Miswati	Gunung Remuk	04/05	300.000,-
5	Suryan	Krajan	01/01	200.000,-
6	Saputri	Krajan	01/02	200.000,-
7	Busani	Pancoran	02/03	300.000,-
8	Misbah	Pancoran	03/03	350.000,-
9	Mardiyah	Selogiri	01/01	350.000,-
Total				2.400.000,-

Sumber: Program Pemberdayaan Masyarakat Program *Smart* Kampung di Desa Ketapang, Tahun 2018.

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui nama-nama penerima bea siswa sebagai salah satu upaya pemberdayaan. Program *smart* kampung juga ditunjukkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat di sektor pendidikan, kenyataan tersebut dapat ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku kepala bagian dinas pemberdayaan masyarakat desa yaitu sebagai berikut:

Pemberdayaan masyarakat dari sektor pendidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan, dimana selama ini proses peningkatan kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Program smart kampung terkait dengan pendidikan yaitu kami mendapatkan bantuan layanan bea siswa sehingga keberadaannya sangat membantu kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak (Wawancara Ibu Ida, tanggal 16 Januari 2019, pukul 12.30 WIB)

Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Syamsul Arifin selaku Bagian Kesra yang menerangkan bahwa:

Smart Kampung yang ada di Desa Ketapang merupakan bentuk nyata dari program pemerintah daerah sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini juga terkait dengan bidang pendidikan. Langkah yang kami lakukan yaitu dengan memberikankan atau menyalurkan bea siswa kepada anak-anak yang masuk dalam kategori keluarga tidak mampu sehingga aktivitas pendidikan tetap berjalan” (Wawancara Bapak Syamsul Arifin, tanggal 15 Januari 2019, pukul 11.45 WIB)

Upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui program bea siswa tersebut maka upaya nyata yang dilakukan yaitu dengan memberikan bea siswa kepada pra sejahtera dengan nilai bea siswa yaitu untuk SD sebesar Rp. 200.000,-/ bulan, SMP sebesar Rp.300.000,- dan SMA yaitu sebesar Rp.350.000,-. Proses pemberian yang dilakukan yaitu secara langsung diberikan kepada orang tua siswa yang diberikan untuk setiap 6 bulan sekali. Selain mengenai masalah bea siswa dalam program *smart kampung* juga didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana sehingga seluruh aktivitas pendidikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan sarana dan prasana ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan bagian pemberdayaan yaitu Ibu Ida yaitu sebagai berikut:

Upaya untuk menunjang kualitas pendidikan bagi masyarakat yaitu dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga aktivitas pendidikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Program smart kampung sebagai media dalam pemenuhan kebutuhan terkait dengan pengelolaan yang mendukung penyediaan sarana dan prasaranapendidikan.(Wawancara Ibu Ida, tanggal 16 Januari 2019, pukul 12.30 WIB)

Manfaat juga dirasakan oleh masyarakat terkait dengan keberadaan Smart Kampung dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, yang dapat

ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Bapak Adi selaku masyarakat yaitu sebagai berikut:

Keberadaan program ini sangat membantu dalam peningkatan kualitas pendidikan, dimana salah satunya mengenai ketersediaan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan pendidikan sehingga pendidikan anak dapat berkembang sesuai dengan ketentuan dan harapan . selain itu dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana yang didukung oleh penggunaan teknologi menjadikan aktivitas pendidikan menjadi lebih berkualitas (Wawancara Bapak Adi, tanggal 17 Januari 2019, pukul 18.30 WIB)

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan penggunaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Banyuwangi mendapat perhatian lebih. Bukan hanya dalam bentuk *website* yang menyajikan informasi, program *Smart* Kampung memberikan peran yang lebih besar dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih optimal. Program *Smart* Kampung merupakan bagian dari program program pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun dalam bentuk Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Program *Smart* Kampung ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi No 18 tahun 2016 tentang Integrasi Program Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart* Kampung termasuk dalam hal ini mendukung pendidikan.

Dalam pelaksanaan program telah ditetapkan standar yang digunakan untuk memberikan penilaian pemberdayaan melalui program *smart* kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi terkait dengan

upaya peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut dikatakan oleh Bapak Syamsul Arifin selaku Bagian Kesra yang menerangkan bahwa:

Salah satu indikator dari Smart Kampung yang ada di Desa Ketapang yaitu "One Stop service" indikator dinamakan Smart Kampung bahwa suatu program harus memenuhi persyaratan tertentu jadi pelaksanaan pelayanan Smart Kampung memiliki model pelayanan berbasis pada satu lingkup ruang tujuannya memberikan dukungan dalam pencapaian program termasuk dalam bidang pendidikan secara cepat, tepat dan efisien". "Kedua didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai didukung oleh internet yang bagus kemudian bertempat diruangan yang memenuhi persyaratan pelayanan didukung aplikasi software berbasis wifi server sehingga pemanfaatannya benar-benar secara riil dalam mendukung program pendidikan yang ditetapkan" (Wawancara Bapak Syamsul Arifin, tanggal 15 Januari 2019, pukul 11.45 WIB)

Dari indikator diatas kemudian muncul inovasi yang bisa disebut *self service* yaitu suatu inovasi agar warga masyarakat mampu memanfaatkan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Manfaat juga dirasakan oleh masyarakat terkait dengan keberadaan *Smart Kampung* dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, yang dapat ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Bapak Adi selaku masyarakat yaitu sebagai berikut:

Menurut saya program ini sangat bagus selain memberikan pelayanan secara cepat juga mendukung aktivitas peningkatan perekonomian juga memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan(Wawancara Bapak Adi, tanggal 17 Januari 2019, pukul 18.30 WIB)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dengan keberadaan program *Smart Kampung* memberikan dampak positif dalam upaya masyarakat dalam melakukan aktivitas peningkatan kualitas pendidikan. Berdasarkan Perbup

Banyuwangi No 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart* Kampung, ruang lingkup program kerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tujuh kriteria berikut, yaitu (1) pelayanan publik, (2) pemberdayaan ekonomi, (3) kesehatan, (4) pendidikan, seni, dan budaya, (5) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, (6) kemiskinan, dan (7) informasi hukum. Selain ruang lingkup program kerja tersebut, program *Smart* Kampung dapat diintegrasikan dengan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Pengembangan *Smart* Kampung didasarkan pada program yang menyentuh langsung pada kepentingan publik dan berbasis pada penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Program *Smart* Kampung terintegrasi dengan sistem perencanaan dan anggaran pemerintah desa/kelurahan, serta sistem pelayanan terpadu baik pelayanan perijinan maupun pelayanan non perijinan. Namun fokus dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui program *Smart* Kampung maka Kabupaten Banyuwangi mampu mengintegrasikan berbagai program pemerintah terutama program-program yang berbasis pada pemerintah desa/kelurahan di Kabupaten Banyuwangi. *Smart* Kampung memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan desa. Berbagai program dan kegiatan pemerintahan desa dapat diintegrasikan ke dalam satu sistem ini (*Smart* Kampung). Berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan publik menjadi sasaran dari program *Smart* Kampung. semua program pemerintah

desa yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi ruang lingkup dalam program *Smart* Kampung khususnya dalam pengelolaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan program yang telah ditetapkan terkait dengan pendidikan. Tak hanya itu, dengan layanan tersebut dapat meringankan masyarakat dalam upaya pengelolaan usaha yang dijalankan yaitu dengan pengembangan usaha yang dilakukan.

Bukan hanya itu manfaat yang didapat warga dari penerapan *Smart* Kampung ini. Kini, berkat adanya *Smart* Kampung, warga Desa Kampung Anyar kini juga dapat mengakses internet (Wifi) berkecepatan tinggi di Balai Desa. Alhasil, Balai Desa menjadi ramai pengunjung. Di Balai Desa, anak-anak dapat mengakses internet untuk mencari bahan pelajaran. Bahkan, setelah melihat tingginya minat para pelajar untuk mengakses internet juga menyediakan perpustakaan yang representatif agar mereka dapat belajar secara lebih optimal, dan hal tersebut dirasakan oleh warga yaitu Ibu Diyah yang mengatakan sebagai berikut:

Orang-orang dewasa pun tak sedikit pula yang memanfaatkan fasilitas internet di Balai Desa Kampung ini. Mereka umumnya, mencari informasi mengenai berbagai hal, terutama tentang peluang-peluang usaha baru yang mungkin dikembangkan di desa mereka. Menjelang Maghrib sampai sehabis Isya, wifi kami matikan agar anak-anak tetap bisa mengaji dan beribadah di masjid atau di rumahnya masing-masing dan hal tersebut secara positif mendukung pelaksanaan pendidikan di wilayah tersebut (Wawancara Ibu Diyah, tanggal 15 Januari 2019, pukul 14.25 WIB)

Melalui kajian ini bukan hanya memberikan gambaran terobosan dalam program *Smart* Kampung namun juga memberikan kerangka dalam pengembangan program *Smart* Kampung ke depan. Teknologi Informasi dalam

bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penyampaian informasi publik. Kebutuhan akan pelayanan pengembangan usaha yang lebih cepat, efektif, efisien dan transparan mendorong dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, dan hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Bapak Hadi selaku warga yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam memberikan pelayanan publik dalam sektor pendidikan selama ini memberikan dukungan dalam proses pengelolaan aktivitas operasional sekolah sehingga upaya pemberdayaan benar-benar sesuai dengan harapan (Wawancara Bapak Hadi, tanggal 15 Januari 2019, pukul 19.30 WIB)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendidikan menjadi tujuan atas pelaksanaan pemberdayaan melalui *Smart* Kampung, dalam hal ini terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pemberian bea siswa kepada siswa yang membutuhkan.

2. Aktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *Smart* Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Proses pemberdayaan masyarakat bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin. Dalam prosesnya perlu diperhatikan bahwa perempuan akan terlibat secara aktif. Proses pemberdayaan masyarakat didampingi oleh suatu tim fasilitator yang

bersifat multidisiplin. Tim pemberdayaan masyarakat sebaiknya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Peran utama tim pemberdayaan masyarakat adalah mendampingi masyarakat dalam melaksanakan proses pemberdayaan. Peran tim pemberdayaan masyarakat pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri, dimana aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program yaitu meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat dan hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

Proses pemberdayaan pada program Smart Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro ini pada dasarnya tidak terlepas dari upaya tiga aktor yaitu dalam hal ini pemerintah, swasta dan masyarakat sendiri. Aktor tersebut menjadikan proses pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Wawancara Bapak Dimas, tanggal 13 Januari 2019, pukul 13.20 WIB)

Berdasarkan pemetaan tiga aktor dalam tabel di atas, maka aktor dalam pelaksanaan program *smart* kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah

Pemerintah lebih banyak berperan pada upaya untuk penetapan kebijakan terkait dengan proses pelaksanaan program sehingga memberikan dukungan terselenggaranya program *Smart* Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Peran pemerintah yang paling menonjol sesungguhnya terletak pada peran pengambilan keputusan dan pendanaan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat terkait dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Namun mengingat adanya

kemungkinan terjadi permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan maka diperlukan mediasi, terutama untuk mengontrol peran swasta supaya berjalan wajar tidak merugikan masyarakat. Hal ini harus diperhitungkan dan dibuat langkah antisipasi, karena seringkali setelah implementasi kebijakan dalam proses pemberdayaan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan, pihak swasta dapat menjalankan tugas dan fungsi pemberdayaan sesuai dengan ketentuan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada

Bapak Syamsul Arifin selaku Bagian Kesra yang menerangkan bahwa:

Smart Kampung yang ada di Desa Ketapang merupakan bentuk atau wujud nyata dalam pelaksanaan atau upaya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat sehingga peran serta masyarakat dalam ditingkatkan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pemerintah desa selalu berupaya untuk memaksimalkan pelaksanaan program tersebut sehingga proses pemberdayaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan (Wawancara Bapak Syamsul Arifin, tanggal 15 Januari 2019, pukul 11.45 WIB)

Terkait dengan aktor dari pihak pemerintah juga dapat diketahui dari hasil wawancara dengan bagian pemberdayaan yaitu Ibu Ida yaitu sebagai berikut:

Dalam mendukung pelaksanaan program kami selalu berupaya untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat sehingga upaya pencapaian tujuan pemberdayaan dapat secara maksimal dilakukan. Proses atau upaya pemberdayaan tersebut dapat berjalan ketika seluruh elemen yang ada dapat bekerja sama sesuai dengan ketentuan (Wawancara Ibu Ida, tanggal 16 Januari 2019, pukul 12.30 WIB)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan juga berfungsi sebagai upaya untuk menjaga kualitas hasil,

pemerintah sebaiknya juga menetapkan pola monitoring dan evaluasi yang jelas, dan berkelanjutan. Program yang sudah dilakukan oleh pemerintah periode sebelumnya hendaknya dapat dipelihara, dimonitor oleh pemerintah berikutnya. Dengan demikian tanggung renteng akan berjalan terus, tanpa mempedulikan telah berapa kali penggantian kepemimpinan berlangsung. Dalam rangka memudahkan pemeliharaan hasil-hasil pemberdayaan yang dilakukan, menjaga kualitas dan tanggung jawab bermitra hendaknya pemerintah menyusun dan menetapkan kriteria evaluasi, pada setiap program pemberdayaan sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

b. PT. Telkom, Tbk.

Pihak swasta dalam hal ini adalah PT. Telkom, Tbk. mengambil peran lebih banyak pada implementasi penentuan langkah atau langkah kebijakan terkait dengan penetapan kebijakan pemberdayaan. Peran demikian perlu ditekankan, supaya terjadi variasi analisis berdasarkan kondisi khusus yang terjadi dalam proses pemberdayaan. Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan akan lebih mendekati kebutuhan lokal. Peran swasta dalam implementasi kebijakan pemberdayaan juga mencakup kontribusi dana melalui investasi swasta yang bermanfaat untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan pihak swasta dapat ditunjukkan dari hasil wawancara kepada Kepala Bagian Telkom wilayah area Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

Kami dari pihak swasta ikut memberikan dukungan dalam upaya pelaksanaan program smart kampung di Desa Ketapang Kecamatan

Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, dimana kami mendukung melalui peyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana tersebut terkait dengan bidang penyediaan layanan teknologi komunikasi dalam hal ini adalah penyediaan jasa layanan internet. Mengingat fasilitas tersebut sangat penting agar segala bentuk program dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan (Wawancara Bapak Hardi, tanggal 17 Januari 2019, pukul 12.00 WIB)

Selanjutnya beliau juga menyatakan bahwa:

Dalam memaksimalkan pelaksanaan program smart kampung kami selaku pihak swasta yang mendukung kebijakan tersebut selalu berupaya melakukan upaya pengemabngan. Kami memberikan dukungan selain fasilitas fisik juga memberikan dukungan dengan memberikan pembelajaran dalam penggunaan fasilitas yang kami tawarkan (Wawancara Bapak Hardi, tanggal 17 Januari 2019, pukul 12.00 WIB)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran pihak swasta dalam hal ini PT. Telkom, Tbk memberikan dukungan berupa fasilitas fisik dalam upaya ketersediaan fasilitas jaringan layanan internet yang mendukung kualitas dari pelaksanaan program *smart* kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Selain penyediaan fasilitas dan kegiatan pelatihan atau pembelajaran dalam penggunaan fasilitas internet pendukung pelaksanaan program, pihak PT. Telkom, Tbk. juga memberikan dukungan yaitu berupa monitoring sehingga penggunaan fasilitas dapat secara tepat digunakan, hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

Dalam upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan smart kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi maka kami juga memberikan pelayanan terkait dengan proses monitoring dan evaluasi atas penggunaan internet sehingga fasilitas tersebut benar-benar bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan program (Wawancara Bapak Hardi, tanggal 17 Januari 2019, pukul 12.00 WIB)

Sedangkan dalam monitoring dan evaluasi pihak swasta juga memberi andil dalam pemeliharaan hasil-hasil yang diperoleh melalui proyek-proyek pemberdayaan masyarakat dari sebagian keuntungan investasi swasta yang telah beroperasi. Dalam program *Smart* Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi memberikan dukungan terkait dengan penyediaan fasilitas teknologi yang mendukung proses pemberdayaan.

c. Masyarakat

Adapun untuk masyarakat secara umum peran masyarakat diberikan dalam bentuk partisipasi baik dalam bentuk partisipasi dalam proses pelaksanaan program sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Masyarakat merupakan subyek yang diberdayakan Tinggi rendahnya partisipasi yang diberikan akan berdasarkan pada tingkat keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat, dan kemampuan pemahaman dalam pelaksanaan aktivitas pemberdayaan yang dilakukan. Bentuk partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Bapak Adi selaku masyarakat yaitu sebagai berikut:

Kami selaku masyarakat selalu berupaya untuk mendukung segala bentuk program yang ditetapkan, dimana program tersebut menjadi tolak ukur atas keberhasilan dalam upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat (Wawancara Bapak Adi, tanggal 17 Januari 2019, pukul 18.30 WIB)

Hasil yang sama juga ditunjukkan dari wawancara dengan Bapak Hadi selaku warga yang menyatakan sebagai berikut:

Dengan melakukan partisipasi dengan turut serta dalam mendukung pelaksanaan program menjadi hal wajib bagi saya selaku masyarakat. Program-program positif kepada masyarakat menjadi hal yang harus didukung pelaksanaannya(Wawancara Bapak Hadi, tanggal 15 Januari 2019, pukul 19.30 WIB)

Bapak Hadi juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

Program smart kampung menurut saya merupakan program yang terbaik dan memberikan dukungan dalam upaya untuk memaksiamalkan potensi yang dimiliki oleh desa sehingga memberikan dukungan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Menurut saya program ini juga memberikan manfaat penuh kepada masyarakat dan pelaksanaannya dapat merata kami rasakan (Wawancara Bapak Hadi, tanggal 15 Januari 2019, pukul 19.30 WIB)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat selama ini merasakan bahwa *program smart kampung* menjadi program yang benar-benar memberikan dukungan dalam proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Program pemberdayaan yang dilakukan secara langsung memberikan manfaat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat dan program tersebut juga memberikan dukungan dalam upaya peningkatan potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa, dan hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Program smart kampung berbeda dengan program yang telah ada, dimana dampak yang ditimbulkan secara langsung saya rasakan, kemudahan dalam proses pemasaran produk yang saya hasilkan misalnya. Saya mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pembeli dengan melakukan program yang ditetapkan oleh program smart kampung(Wawancara Bapak Adi, tanggal 17 Januari 2019, pukul 18.30 WIB).

Bertolak dari kondisi demikian ini, maka bagian dalam proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara terkait dengan proses pemberdayaan yang dilakukan:

- 1) Memberikan ruang yang lebar kepada masyarakat untuk menyampaikan ide, masukan, kritik, rasa keberatan, permintaan dsb, tanpa diberi sanksi dan ancaman
- 2) Memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat, yang menyangkut berbagai aspek pembangunan lokal maupun nasional.
- 3) Pelibatan masyarakat sebagai upaya untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat terhadap program yang ditetapkan.

Menurut Bapak Hadi keberadaan program *smart* kampung juga memberikan dukungan dalam proses meningkatkan peran masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara berikut:

Program smart kampung menurut saya juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan perannya terkait dengan potensi ekonomi yang dimiliki. Saya dapat meningkatkan kemampuan secara ekonomi juga memberikan kesempatan dalam peningkatan potensi modal atau pendanaan usaha yang saya jalankan (Wawancara Bapak Hadi, tanggal 15 Januari 2019, pukul 19.30 WIB)

Peran lain masyarakat yang dapat digali dan dikembangkan adalah pendanaan. Partisipasi di bidang pendanaan atau peningkatan modal, merupakan potensi internal yang dimiliki oleh masyarakat. Peran masyarakat yang lain dan memiliki posisi yang sangat penting adalah pada pemeliharaan kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan

hasil-hasil pembangunan. Diantara masyarakat sendiri hendaknya tumbuh dan mengembangkan sistem kontrol yang sehat dalam masyarakat sehingga upaya pendapaian tujuan dari program *smart* kampung dapat dimaksimalkan.

3. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Program *Smart* Kampung sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan dukungan sistem informasi yang terintegrasi tidak hanya terkait dengan kemampuan sumber daya manusia dan sumber dana tetapi juga lebih dalam terkait dengan berbagai dukungan sarana dan prasarana demi terselenggaranya *Smart* Kampung secara optimal.

a. Faktor Pendukung

1. Faktor Internal

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, yaitu adanya dukungan dari aparatur desa yang memiliki komitmen terhadap sistem pengelolaan desa, hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Dimas selaku staff desa bagian pengelolaan *smart* kampung sebagai berikut:

Faktor pendukung yang sangat menentukan keberhasilan dalam program pelaksanaan Program Smart Kampung adanya aparatur yang mendukung aktivitas pemberdayaan masyarakat yaitu adanya aparatur yang bersih sehingga mendukung sistem

pengelolaan yang dilakukan(Wawancara Bapak Dimas, tanggal 13 Januari 2019, pukul 13.20 WIB)

Smart Kampung membawa masyarakat lebih dekat terkait akses pelayanan, pelayanan yang sebelumnya dilakukan pada tingkatan kabupaten atau kecamatan dapat dilakukan pada tingkatan pemerintahan desa/kelurahan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan melalui program *Smart* Kampung bertujuan untuk memberikan pelayanan yang gratis/praktis, transparan, mudah diakses, pelayanan cepat, pemerintah bebas korupsi, serta didukung & diapresiasi oleh masyarakat. Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu mengenai sarana dan prasarana, yang ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku kepala bagian dinas pemberdayaan masyarakat desa sebagai berikut:

Faktor sarana dan prasana menjadi hal penting untuk menjadikan program aktivitas pengelolaan dapat secara maksimal dilakukan. Saran dan prasana menjadi pendukung yang menjadikan proses pengelolaan dapat secara maksimal dilakukan (Wawancara Ibu Ida, tanggal 16 Januari 2019, pukul 12.30 WIB)

Selain itu aktivitas evaluasi dilakukan juga memberikan dampak terhadap pengelolaan, yaitu ditunjukkan hasil wawancara dengan Ibu Ida selaku kepala bagian dinas pemberdayaan masyarakat desa yaitu sebagai berikut:

Aktivitas evaluasi yang dilakukan untuk melakukan penilaian pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program smart kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan melakukan penilaian atas pencapaian

kinerja dalam pelaksanaan program sehingga pelaksanaan portensi dalam aktivitas pelaksanaan program dapat dikendalikan dengan baik (Wawancara Ibu Ida, tanggal 16 Januari 2019, pukul 12.30 WIB)

2. Faktor Eksternal

Selain itu dari hasil wawancara dengan pihak eksternal atau pihak swasta yang memberikan dukungan pelaksanaan program yaitu sebagai berikut:

Saya selaku atau atas nama perusahaan selalu berupaya untuk memberikan dukungan terkait dengan upaya pemberdayaan ekonomi dan pendidikan yaitu dengan mendukung melalui sarana dan prasarana sehingga aktivitas pengelolaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Wawancara Bapak Rahmad, tanggal 17 Januari 2019, pukul 14.30 WIB)

Masyarakat dapat mengajukan melalui saran teknologi informasi dan segera diproses sehingga aktivitas pengelolaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat dilakukan karena adanya integrasi data dan informasi kependudukan sebagai basis data dalam program *Smart* Kampung. Dalam penyelenggaraan pelayanan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi informasi integrasi atau keterpaduan data menjadi hal yang utama. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena sosial tertentu peneliti dapat menggambarkan relaitas sosial atau fenomena yang terjadi dengan menggunakan data-data yang ada.

Pembahasan Analisis Pelaksanaan Program *Smart* Kampung di Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan

terhadap pelaksanaan program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi, maka dapat dilihat beberapa temuan terkait pelaksanaan program *Smart* Kampung di Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Komitmen Kades - Penyediaan sarana, prasarana dan infrastuktur
2. Desa yang memiliki kantor dan lahan luas mampu menyediakan semua sarana dan prasarana penunjang
3. Desa yang memiliki lahan dan kantor tidak begitu luas setidaknya menyediakan jaringan internet dan meja resepsionis Komitmen Pemda
4. Fasilitasi MoU/kerjasama antara desa dengan telkom Anggaran
5. Desa mengalokasikan dalam APBDes melalui ADD
6. Kabupaten menambah besaran ADD 2 SDM Petugas
7. Kepala Dusun seharusnya langsung melayani masyarakat namun yang terjadi pelayanan dilakukan di kantor desa
8. Penyediaan resepsionis dan operator
9. Resepsionis dan operator dapat berasal dari perangkat desa dan juga merekrut pegawai baru Pelatihan
10. Pemda melakukan pelatihan kepada operator terkait sistem yang digunakan dalam program *Smart* Kampung 3 Aplikasi Kemudahan penggunaan Kelengkapan aplikasi 4 Jaringan Penggunaan jaringan
11. Portal yang ada mudah digunakan

12. Pada setiap menu pelayanan belum menyediakan prosedur dan persyaratan pelayanan
13. Belum terdapat pedoman pelaksanaan secara rinci tentang portal dan aplikasi yang terdapat pada program *Smart* Kampung Integrasi data
14. Terintegrasi dengan data kependudukan
15. Belum terintegrasi dengan data bantuan yang sudah diterima masing-masing warga
16. Jaringan PDE dari Dishubkominfo
17. Jaringan internet fiber optik dari PT Telkom Indonesia

Desa membagi penggunaan jaringan yaitu untuk pelayanan dan juga untuk fasilitas Wifi warga Kualitas jaringan . Jaringan PDE sering mengalami gangguan pada saat jam pelayanan atau menjadi lebih lambat. Jaringan internet fiber optik terkadang mengalami masalah jaringan Dari beberapa temuan terkait pelaksanaan program *Smart* Kampung di Kabupaten Banyuwangi didukung oleh seluruh elemen yang terkait sehingga potensi pengelolaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan.

b. Faktor Penghambat

1. Faktor Internal

Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program *Smart* Kampung di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi yaitu: Komitmen pemerintah Kabupaten Banyuwangi

dalam bentuk peraturan perundang-undangan masih kurang. Belum adanya perangkat perundangundangan sebagai penjabaran dari Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart* Kampung, sehingga pelaksanaan program *Smart* Kampung di Kabupaten Banyuwangi masih belum maksimal.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart* Kampung yang menjadi dasar pelaksanaan program *Smart* Kampung masih bersifat sangat umum dan perlu adanya peraturan perundang-undangan yang menjabarkan dan lebih rinci terkait pelaksanaan program *Smart* Kampung. Peraturan penjabaran ini dapat berupa petunjuk teknis, petunjuk operasional dan juga standar operasional prosedur pelaksanaan program *Smart* Kampung. Kurangnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau personil yang langsung terkait dengan pelaksanaan program *Smart* Kampung terutama operator dan resepsionis. Telah dilakukan berbagai jenis pelatihan yang diberikan kepada operator *Smart* Kampung, namun masih kurangnya pelatihan kepada resepsionis selaku personil yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam proses pelayanan. Resepsionis merupakan garda terdepan dalam pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga perlu adanya resepsionis yang mampu melayani dengan baik

Terjadi rangkap jabatan oleh perangkat desa, yaitu perangkat desa yang merangkap jabatan sebagai operator ataupun resepsionis *Smart* Kampung, karena pemerintah desa belum melakukan perekrutan personil baru yang khusus mengisi jabatan operator dan resepsionis *Smart* Kampung. Aplikasi atau sistem yang digunakan dalam program *Smart* Kampung di Kabupaten Banyuwangi masih memerlukan beberapa perbaikan baik dalam hal ketersediaan informasi maupun integrasi data. Aplikasi dan sistem yang digunakan *Smart* Kampung yang terdiri dari beberapa website terkait belum sepenuhnya terintegrasi dengan program-program pemerintah yang lain, seperti halnya integrasi dengan data BPJS, data penerima bantuan dan lain hal sebagainya. Integrasi data diperlukan karena program *Smart* Kampung juga terkait dengan berbagai pelayanan kependudukan, kesehatan, pendidikan serta layanan bagi masyarakat miskin. Selain hal tersebut, pada aplikasi dan sistem *Smart* Kampung belum tersedia informasi terkait pelayanan pemerintah desa, baik itu informasi persyaratan pelayanan dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Arifin selaku Bagian Kesra yaitu sebagai berikut:

Faktor penghambat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program smart kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yaitu dalam proses layanan jaringan, dimana selama ini aktivitas dalam pelaksanaan program tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga menjadikan program tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan (Wawancara Bapak Syamsul Arifin, tanggal 15 Januari 2019, pukul 11.45 WIB)

2. Faktor Eksternal

Permasalahan jaringan internet dalam program *Smart Kampung* masih mengalami beberapa permasalahan. Jaringan internet yang digunakan untuk program *Smart Kampung* terdiri dari jaringan internet fiber yang bekerjasama dengan PT.Telkom serta jaringan PDE yang disediakan oleh Dishubkominfo Kabupaten Banyuwangi. Kedua jaringan tersebut seringkali mengalami gangguan, jaringan PDE sering mengalami gangguan ketika jam pelayanan dan jaringan internet fiber sering mengalami permasalahan terkait kecepatan akses jaringan. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara sebagai berikut:

Jaringan internet yang tidak stabil menurut saya menjadi pengahmbat dalam proses aktivitas pelayanan yang dilakukan, dimana dalam proses pelayanan internet sering mengalami gangguan dan tidak stabil menjadikan pelayanan belum sesuai dengan harapan (Wawancara Bapak Syamsul Arifin, tanggal 15 Januari 2019, pukul 11.45 WIB)

Model Akselerasi Pelayanan Desa Terintegrasi Melalui Program *Smart Kampung* di Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan pada hasil analisis terhadap pelaksanaan program *Smart Kampung* di Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik beberapa strategi dalam akselerasi pelayanan desa terintegrasi melalui program *Smart Kampung* di Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan aturan pendukung Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart Kampung* baik

- b. Melakukan integrasi berbagai data kependudukan dan data-data terkait dalam sistem *smart* kampung
 - c. Menyusun standar operasional pelayanan program *Smart* Kampung
 - d. Penyusunan modul dan petunjuk penggunaan aplikasi *smart* kampung
 - e. Pelatihan pelayanan kepada para resepsionis yang menjadi pintu terdepan dalam proses pelayanan pada program *Smart* Kampung
 - f. Peningkatan Bandwith jaringan PDE
 - g. Memperkuat fasilitasi kerjasama antara pemerintah desa dengan PT Telkom 2 Pemerintah Desa
 - h. Melakukan perencanaan penambahan personil atau pegawai untuk mengisi jabatan resepsionis dan operator *smart* kampung
 - i. Melakukan penataan dan pengelolaan ruang dan lahan untuk mendukung pelaksanaan program *Smart* Kampung
 - j. Melakukan update informasi hukum terkait dengan perundang-undangan di tingkat desa Dari berbagai penjelasan tentang pelaksanaan dan analisis permasalahan yang dihadapi program *Smart* Kampung di Kabupaten Banyuwangi dapat digambarkan model akselerasi pelayanan desa terintegrasi melalui program *Smart* Kampung di Kabupaten Banyuwangi yaitu: Model Akselerasi Pelayanan Desa Terintegrasi Melalui Program *Smart* Kampung di Kabupaten Banyuwangi Sumber Daya Manusia
- A. Tersedianya personil pelaksana *smart* kampung

- B. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia Kepemimpinan
 - Dukungan regulasi Kabupaten Banyuwangi
- C. Peningkatan ADD dari Kabupaten Banyuwangi
- D. Fasilitasi infrastruktur jaringan dan kerja sama oleh Pemda
- E. Perencanaan anggaran APBDes
- F. Strategi pelayanan yang dikembangkan pemerintah desa Akselerasi pelayanan desa melalui program *smart* kampung Aplikasi
- G. Integrasi data kependudukan dan berbagai data terkait
- H. Tersedianya informasi yang jelas
- I. Kemudahan dalam penggunaan Jaringan
- J. Tersedianya jaringan Internet fiber dan PDE
- K. Peningkatan kualitas jaringan Kesimpulan Program *Smart* Kampung mampu meningkatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Melalui *Smart* Kampung dan berbagai fitur yang terdapat di program *Smart* Kampung mampu meningkatkan pelayanan pemerintah desa menjadi lebih baik. Proses pelayanan menjadi lebih cepat, mudah dan murah. Pelayanan dilakukan dengan konsep satu atap yaitu pelayanan dipusatkan pada pemerintahan di desa, bukan lagi di kabupaten atau kecamatan sehingga lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam aspek kepemimpinan terdapat beberapa hal menarik terkait pelaksanaan program *Smart* Kampung di Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

- a. Dukungan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi terkait anggaran yang cukup dari pemerintah daerah terkait dengan peningkatan ADD, hal ini terkait dengan pelaksanaan program *Smart* Kampung menggunakan anggaran ADD
- b. Dukungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal aturan perundangundangan masih lemah, di mana dasar pelaksanaan program *Smart* Kampung yaitu Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui *Smart* Kampung, sedangkan peraturan lain yang menjadi petunjuk pelaksanaan program *Smart* Kampung secara lebih jelas belum ada.
- c. Dukungan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam memfasilitasi penyediaan jaringan internet
- d. Komitmen pelaksana yaitu pemerintah desa dalam bentuk dukungan anggaran serta sarana dan prasarana pendukung program *Smart* Kampung tinggi, di mana pemerintah desa menganggarkan penyediaan sarana dan prasarana *Smart* Kampung
- e. Strategi pelayanan yang dikembangkan oleh pemerintah desa sebagai bentuk komitmen penyeenggaraan pelayanan yang bebas suap atau pungutan liar (pungli), dengan mengurangi potensi pungli.

C. Pembahasan

1. Bentuk-bentuk Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

a. Memberikan bantuan motivasi moril

Bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *Smart* Kampung sebagai langkah nyata dalam pemanfaatan program tersebut sebagai upaya dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan yang dilakukan terkait dengan bentuk bantuan motivasi moril dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pelatihan usaha

Pelaksanaan pelatihan usaha yang dilakukan melalui pelaksanaan program *smart* kampung selama ini bentuk aktivitas nyata yang dilakukan dengan melakukan atau melaksanakan kegiatan pelatihan usaha sehingga mendukung aktivitas pengembangan ekonomi masyarakat. Pelatihan yang kontinyu dan terprogram merupakan salah satu bentuk nyata dalam pelaksanaan program *smart* kampung. Pelatihan yang dilakukan secara terprogram merupakan bentuk nyata dari aktivitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan.

Pelaku usaha juga memiliki kesadaran bahwa melalui kegiatan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, yang sudah tentu berpengaruh besar atas usaha yang dijalankan. Menurut Hamalik (2007), tujuan umum pelatihan adalah: (1) Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. (2) Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara

rasional. (3) Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan manajemen (pimpinan). Adapun tujuan khusus pelatihan adalah: (1) Tujuan latihan induksi, yaitu untuk membantu pegawai menyelesaikan pekerjaannya yang baru dan untuk memberikan beberapa ide mengenai perusahaan dan latar belakang pekerjaannya. (2) Tujuan latihan kerja, yaitu untuk memberikan instruksi khusus guna melaksanakan tugas-tugas dari suatu jabatan tertentu. (3) Tujuan latihan pengawas, yaitu untuk memberikan pelajaran kepada pegawai tentang bagaimana memeriksa dan mengawasi serta melatih pegawai-pegawai lainnya. (4) Tujuan latihan manajemen, yaitu untuk 76 Jurnal JIBEKA Volume 12 No 1, 2018: 74 - 82 memberikan latihan yang diperlukan dalam jabatan manajemen puncak (misal : akuntan, sekretaris, dll). (5) Tujuan latihan pengembangan pemimpin adalah untuk mengembangkan dan menambah kemampuan pemimpin-pemimpin yang sudah ada.

Menurut Hamalik (2007) program pelatihan meliputi unsur-unsur sebagai berikut: (1) Peserta latihan. Penetapan calon peserta latihan erat kaitannya dengan keberhasilan proses pelatihan yang nantinya turut menentukan efektifitas pekerjaan. Oleh karena itu perlu dilakukan seleksi yang teliti untuk memperoleh peserta yang baik berdasarkan kriteria antara lain : jenjang pendidikan dan keahlian, jabatan, pengalaman kerja, motivasi dan minat, pribadi serta intelektual; (2) Pelatih (instruktur). Pelatih memegang peran penting terhadap kelancaran dan keberhasilan program pelatihan. Itu sebabnya perlu dipilih pelatih yang ahli, berkualifikasi dan profesional. Beberapa syarat

sebagai pertimbangan adalah: telah disiapkan secara khusus sebagai pelatih, ahli di bidang spesialisasi tertentu, berkepribadian baik, berasal dari lingkungan dalam organisasi (lebih baik daripada berasal dari luar organisasi); (3) Lamanya pelatihan. Lamanya masa pelatihan berdasarkan pertimbangan tentang: jumlah dan mutu kemampuan yang hendak dipelajari di pelatihan tersebut, kemampuan belajar para peserta dalam pelatihan, serta media pengajaran; (4) Bahan latihan. Bahan latihan sebaiknya disiapkan secara tertulis agar mudah dipelajari peserta. Cara penulisannya agar disesuaikan dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku; dan (5) Bentuk pelatihan.

Bentuk pelatihan yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan pegawai antara lain : learning on the job, problem solving, belajar melalui observasi, kuliah, latihan, penyuluhan, kursus studi, seminar, pengajaran dengan mesin, permainan bisnis, rotasi jabatan, program pengembangan manajemen, task force, dan lain-lain. Pembinaan Dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1998, pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri, serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Menurut Widjaja, 2002 (dalam Alhempri, Raden, 2013), pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya. Dari

definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan penyuluhan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1998 diatur mengenai beberapa hal. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: (1) Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil, (2) Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil, (3) Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan, dan (4) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat berupa: (1) Penyediaan tenaga konsultan profesional, sarana, prasarana, teknologi, dana dan informasi, (2) Bimbingan dan konsultan, (3) Pendidikan dan pelatihan, (4) Advokasi, dan (5) Pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil. Pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program *smart* kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi menjadikan aktivitas operasional dapat secara maksimal dilakukan dan mendukung upaya pengembangan usaha yang dilakukan.

2) Permodalan

Persoalan modal masih menjadi suatu kendala bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkembang. Mereka tidak dapat memenuhi jumlah pesanan atau permintaan konsumen karena kekurangan biaya untuk produksi. Kebijakan dengan memberikan modal usaha pada program *Smart Kampung* menjadikan aktivitas pengelolaan usaha dalam hal ini UMKM dapat berkembang sesuai dengan harapan.

Perkembangan usaha yang terdapat di masyarakat desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi semakin hari semakin meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dengan kebutuhan yang semakin bertambah dan membawa persoalan dalam pemenuhannya. Kebutuhan akan menimbulkan suatu dorongan atau desakan alami untuk memuaskan kebutuhan tersebut dan adanya kecenderungan untuk mempertahankan hidup. Kebutuhan akan mudah terpenuhi bila sumber-sumber tersedia, tetapi apabila jumlahnya terbatas, maka manusia akan tertantang untuk memenuhi kebutuhan. Keadaan ekonomi yang semakin sulit yang terjadi di Indonesia, khususnya dialami oleh wirausahawan, baik usaha yang bersifat kecil, menengah, maupun usaha berskala besar. Wirausahawan yang bergerak di sektor industri, perdagangan, pertanian mengalami kendala dengan keadaan ekonomi yang sulit tersebut. Kendala yang dialami oleh pelaku usaha di bidang ekonomi, yaitu permodalan bagi usaha kecil pada khususnya maupun penambahan modal pada kegiatan usaha yang sudah mapan.

Kondisi demikian menyebabkan masyarakat umum dan wirausahaan sangat membutuhkan bantuan modal usaha yang terjangkau untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan naiknya daya beli. Para pedagang kecil merupakan salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang perlu mendapat uluran dari tangan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Permasalahan yang sering dihadapi pedagang kecil dalam meningkatkan usahanya ialah kesulitan dalam permodalan. Untuk meningkatkan usahanya dibutuhkan modal yang didapatkan adalah modal yang mempunyai suku bunga tinggi yang diperoleh dari para rentenir. Hal tersebut tetap berlangsung karena tidak ada jalan lain yang harus dilakukan. Kondisi ini dapat terpenuhi pada program *Smart Kampung*, dimana pelaksanaan program terkait dengan bantuan secara finansial dan fisik.

Pada umumnya usaha kecil tidak mempunyai pendidikan yang cukup untuk meningkatkan usahanya. Kurangnya pendidikan membuat mereka tidak menyadari pentingnya pengetahuan pasar untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mereka untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Selain itu kurangnya perencanaan juga menjadi masalah bagi pedagang kecil, usaha akan berjalan baik apabila dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang bagus seperti beberapa persediaan barang yang harus dibeli dan bagaimana strategi yang diterapkan agar mencapai laba yang tinggi. Pada dasarnya pedagang kecil tidak mempunyai administrasi keuangan yang baik yang dapat memberikan gambaran dari waktu ke waktu. Sehingga pedagang tidak dapat mengetahui apakah usahanya dalam keadaan untung atau rugi karena antara

modal dan keuangan rumah tangga tidak dapat dipisahkan. Kondisi ini menjadi salah satu tujuan yang ditetapkan melalui program *Smart* Kampung sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan permodalan usaha dalam mendukung pelaksanaan aktivitas usaha yang dilakukan.

Masalah modal dalam perusahaan merupakan persoalan yang tidak akan pernah berakhir, mengingat masalah modal mengandung begitu banyak aspek. Modal sebagai “*keloktifitas*” dari barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit, sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang modal adalah semua barang-barang yang ada dalam rumah tangga usaha dan fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan (Riyanto, 2010:18). Arti modal adalah sebagai suatu kekuasaan untuk menggunkan barang-barang modal. Jadi permodalan dapat menggambarkan bentuk-bentuk penanaman dana yang diperoleh sebagai upaya peningkatan usaha.

b. Pendidikan

1) Pemberian Bea Siswa

Tujuan dalam pelaksanaan dari program *Smart* Kampung yaitu adanya upaya peningkatan kualitas pendidikan. Upaya peningkatan pendidikan yang secara nyata dapat ditunjukkan dari kebijakan mengenai pemberian bea siswa kepada siswa atau masyarakat yang memiliki kriteria yang ditetapkan. Tingginya harapan masyarakat dengan adanya pendidikan bagi masyarakat terlihat dari keantusiasan orang tua dalam menyekolahkan putra-putrinya dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi, dan hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan program program *Smart* Kampung. Terkait

dengan upaya telah menetapkan empat kebijakan, yaitu: pembangunan satuan pendidikan, penyempurnaan sistem pembelajaran, penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan bantuan pendanaan peserta didik (Freyani, 2013). Peningkatan kualitas atau mutu pendidikan tidaklah mudah.

Pemerintah Banyuwangi mendorong penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga padatingkatan pemerintahan desa. Pemerintah kabupaten Banyuwangi saat ini tengah mengembangkan *Smart Kampung* yaitu suatu program yang berbasis teknologi informasi di tingkat desa. *Smart Kampung* merupakan program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan teknologi informasi berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan pelayanan publik. Sampai saat ini, dari 189 desa yang tersebar di Banyuwangi, 80 desa sudah menjalankan *Smart Kampung*.

Targetnya semua desa telah menjalankan program ini hingga awal 2018. Berdasarkan Perbup Banyuwangi No. 18 tahun 2016 tentang integrasi program berbasis Desa/Kelurahan melalui *Smart Kampung*, ruang lingkup program kerjapemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tujuh kriteria berikut, yaitu (1) pelayanan publik, (2) pengembangan ekonomi, (3) kesehatan, (4) pendidikan, seni, dan budaya, (5) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, (6) kemiskinan, dan (7) informasi hukum. Selain ruang lingkup program kerja tersebut, program *Smart Kampung* dapat diintegrasikan dengan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi sosialbudaya setempat.

Pengembangan Smart Kampung didasarkan pada program yang menyentuh langsung pada kepentingan publik dan berbasis pada penggunaan teknologi informasi dalam hal ini terkait dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasara pendidikan dengan penggunaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten Banyuwangi mendapat perhatian lebih. Bukan hanya dalam bentuk website yang menyajikan informasi, program Smart Kampung memberikan peran yang lebih besar dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih optimal. Program Smart Kampung merupakan bagian dari program terkait dengan pengembangan pendidikan, dimana dengan pemberian bea siswa terkait dengan mendukung pelaksanaan program pendidikan.

Beberapa upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program masyarakat tidak mengalami peningkatan mutu dikarenakan beberapa hal yaitu: a) Masalah pendidiknya, tidak sedikit lembaga pendidikan yang masih asal-asalan berjalan disebabkan karena usia yang relatif baru sehingga pendidiknya kurang berkualitas, belum kreatif dan inovatif dan minimnya dukungan dalam penggunaan sarana dan prasarana sehingga kualitas pendidikan tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan; b) Lembaga pemndidikan yang masih baru pelaksanaan program masih bersifat maksimal, asal dapat peserta didik tanpa memperhatikan kualitas pelayanan pendidikan, baik dari segi sarana prasarana, tenaga pendidik/pengasuh, maupun metode pembelajarannya dan c) Tenaga pendidik yang berkualifikasi dan

berkompetensi yang ada sangat terbatas, serta yang berlatar belakang pendidik, masih heterogen bahkan tak sedikit yang berdasar pengalaman semata.

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa tujuan dalam pengelolaan program Smart Kampung yaitu:

- a. Mensinergikan program kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran terkait dengan pengelolaan ekonomi masyarakat dan aktivitas peningkatan kualitas pendidikan.
- b. Meningkatkan fungsi pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kualitas pendidikan.
- c. Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat agar dapat langsung dinikmati oleh lapisan masyarakat paling bawah, - Meningkatkan partisipasi dan serta masyarakat dalam pelaksanaan program kerja pemerintah kabupaten
- d. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara terpadu. Berdasarkan pada hal tersebut, dapat dilihat bahwa salah satu prioritas program Smart Kampung yaitu bagaimana pemerintah meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih menyentuh masyarakat pada setiap lapisan dan juga dilakukan secara terpadu. Melalui program Smart Kampung Kabupaten Banyuwangi, pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara

terpadu/terintegrasi pada setiap lini pelayanan. Smart Kampung memberikan nilai tambah dalam pelayanan masyarakat.

Program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi menyentuh pada semua lini dan urusan pemerintahan terutama urusan pada tingkatan pemerintah desa/kelurahan yang menjadi pelaksana program Smart Kampung. Melalui program Smart Kampung, berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tingkatan desa/kelurahan dapat dilakukan secara sinergis dan terpadu satu sama lain. Hal ini mengurangi adanya tumpang tindih data dan pelaksanaan program pemerintah. Smart Kampung memberikan ruang bagi program kerja pemerintah dalam segala bidang secara terintegrasi dan terpadu antar satu instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lain, sehingga setiap program kerja dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Pelaksanaan Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan pada desa/kelurahan yang telah memenuhi kualifikasi, sehingga upaya peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi menjadi bentuk riil dalam proses pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

2. Aktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Smart Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Aktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Smart Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah

Pemerintah lebih banyak berperan pada upaya untuk penetapan kebijakan terkait dengan proses pelaksanaan program sehingga memberikan dukungan terselenggaranya program *Smart* Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Dalam konteks kelembagaan lain, peranan adalah aspek dinamis suatu lembaga, atau peranan mewakili tata institusional (*institutional order*) suatu lembaga (dalam hal ini pemerintah) (Berger dan Luckmann 2002 :92) Jadi, peranan adalah pelaksanaan fungsi oleh pemerintah Pengertian pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (UU No. 32 Tahun 2004, Pasal I, ayat 3). Pemberdayaan masyarakat adalah mengenai peningkatan kekuatan dari kelemahan, atau penyiapan kepada masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan Politik (Pranarka dalam Prijono dan Pranarka 1996 :208-219). Jadi, peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dari kelemahan masyarakat, atau penyiapan kepada masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian guna meningkatkan

kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka,serta untuk dapat berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri di daerah. Pelaksanaan fungsi pemerintah daerah tersebut dikatakan berhasil apabila masyarakat di daerah setempat telah berdaya dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan politik.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan juga berfungsi sebagai upaya untuk menjaga kualitas hasil, pemerintah sebaiknya juga menetapkan pola monitoring dan evaluasi yang jelas, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengetahui bentuk-bentuk partisipasinya, serta mengetahui faktor-faktor partisipasi masyarakat tersebut. Peran pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah baik. Bentuk partisipasi masyarakat berupa partisipasi dalam musrenbang dan partisipasi fisik dalam pelaksanaan pembangunan. Faktor penghambatnya adalah dari tingkat kesadaran masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, sikap mental masyarakat dan faktor ekonomi masyarakat.

b. Pihak Swasta

Peranan pihak swasta mengambil peran lebih banyak pada implementasi penentuan langkah atau langkah kebijakan terkait dengan penetapan kebijakan pemberdayaan. Peran demikian perlu ditekankan, supaya terjadi variasi analisis berdasarkan kondisi khusus yang terjadi

dalam proses pemberdayaan. Otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana. Namun implementasi kebijakan tersebut belum maksimal diterapkan karena keberadaan daerah-daerah otonom baru tidak diiringi dengan kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang memadai.

Dengan demikian banyak terjadi keterlambatan dalam pembangunan terutama pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mencari solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya pihak swasta. Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mengingat tidak semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan *skill* SDM dan finansial sehingga perlu keterlibatan pihak swasta. Bentuk kerjasama yang melibatkan pihak swasta ini dalam proses penyediaan sarana infrastruktur dalam mendukung pelayanan masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan akan lebih mendekati kebutuhan lokal. Peran swasta dalam implementasi kebijakan pemberdayaan juga mencakup kontribusi dana melalui investasi swasta yang bermanfaat untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dalam monitoring dan evaluasi pihak swasta juga memberi andil dalam pemeliharaan hasil-hasil yang diperoleh melalui proyek-proyek pemberdayaan masyarakat dari sebagian keuntungan investasi swasta yang telah beroperasi. Dalam program Smart Kampung di Desa Ketapang

Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi memberikan dukungan terkait dengan penyediaan fasilitas teknologi yang mendukung proses pemberdayaan.

c. Masyarakat

Peran masyarakat secara umum peran masyarakat diberikan dalam bentuk partisipasi baik dalam bentuk partisipasi dalam proses pelaksanaan program sehingga dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Masyarakat merupakan subyek yang diberdayakan Tinggi rendahnya partisipasi yang diberikan akan berdasarkan pada tingkat keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat, dan kemampuan pemahaman dalam pelaksanaan aktivitas pemberdayaan yang dilakukan. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu syarat mutlak dalam era kebebasan dan keterbukaan ini.

Pengabaian terhadap faktor ini, terbukti telah menyebabkan terjadinya deviasi yang cukup signifikan terhadap tujuan pembangunan itu sendiri yaitu keseluruhan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemborosan keuangan negara merupakan implikasi lain deviasi tersebut. Proses pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam implementasi proyek-proyek pembangunan di tingkat kabupaten/kota, terbukti telah berhasil membawa perubahan-perubahan mendasar dalam peningkatan kesejahteraan keluarga-keluarga pedesaan (Clark, 2005). Lebih lanjut Sumodiningrat (2006) mengemukakan bahwa pemihakan dan

pemberdayaan masyarakat dalam keseluruhan rangkaian penyusunan program-program pembangunan, perlu diyakini oleh aparaturnya pemerintah (daerah) sebagai strategi yang tepat untuk menggalang kemampuan ekonomi nasional, sehingga mampu berperan secara nyata dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, keyakinan itu juga perlu terus ditanamkan dalam diri aparaturnya yang secara fungsional menangani proses-proses penyusunan program pada kabupaten/kota untuk selanjutnya ditingkatkan serta dimasyarakatkan, kemudian yang terpenting dan juga menjadi tantangan utama adalah bagaimana menerjemahkannya dalam usaha-usaha yang nyata. Upaya-upaya ke arah tersebut tidak secara serta merta dapat terwujud dan harus melalui proses berliku-liku yang akan menghabiskan banyak waktu serta tenaga, dan tampaknya harus dilakukan oleh aparaturnya yang memiliki integritas dan hati nurani yang jernih, karena dalam pelaksanaannya dalam masyarakat akan banyak mempergunakan mekanisme komunikasi timbal balik, mendengar dan menampung dengan penuh kesabaran, dan sikap toleransi dalam menghadapi pandangan yang berbeda (*community approach*). Secara sistematis peran aktor dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program smart kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dapat disajikan pada Tabel 4.2.



Tabel 4.2 Peran Aktor Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Smart Kampung Di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Aktor	Peran dalam Pemberdayaan	Bentuk Output Peran	Fasilitasi
Pemerintah	Penetapan kebijakan terkait dengan upaya pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Smart Kampung	Kebijakan terkait dengan tata kelola dalam proses pelaksanaan program dan sebagai pihak yang memberikan pengawasan terkait dengan pelaksanaan program.	Dana, Jaminan, alat, teknologi, network, sistem manajemen informasi, edukasi
Swasta	Sebagai media pendukung dalam pelaksanaan program, dimana dalam hal ini terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	Pembantuan dalam proses pendanaan dan proses pendukung fasilitas pelaksana program.	Dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil
Masyarakat	Memiliki partisipasi dalam pelaksanaan program dan masyarakat merupakan sumbu yang diberdayakan.	Melakukan aktivitas secara langsung terkait dengan pelaksanaan program serta memberikan berbagai dukungan sehingga program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.	Tenaga pelaksana dalam proses pelaksanaan program.

Sumber: Diolah Peneliti

3. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dari faktor internal dapat diketahui adanya komitmen dalam proses pengelolaan desa dan sarana

serta prasarana yang dimiliki sehingga aktivitas pemberdayaan dapat dilakukan. Apabila dilakukan suatu kajian aturan main proses penyusunan program-program pembangunan yang dilakukan selama ini sesungguhnya merupakan mekanisme ideal, artinya berniat mengakomodasikan sebesar-besarnya aspirasi masyarakat (desa). Proses penyusunan program pembangunan, dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari tingkat desa yaitu kegiatan musyawarah pembangunan desa, kemudian dibawa ke tingkat kecamatan melalui diskusi unit daerah kerja pembangunan, demikian seterusnya hingga disalurkan di tingkat kabupaten/kota yang melibatkan lintas unit-unit kerja kabupaten/kota.

Namun mengapa mekanisme yang cukup baik tersebut tetap dianggap kurang dapat mengakomodasikan hal-hal yang sesungguhnya diinginkan masyarakat apabila tidak didukung oleh komitmen yang dimiliki para pelaksana dan didukung oleh penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program. Seperti yang telah dikemukakan di atas, kesalahan tentu akan dialamatkan kepada tidak dilakukannya secara sungguh-sungguh komitmen pelaksana atau aparatur yang terlibat secara fungsional dalam proses penyusunan program-program pembangunan, kepada masyarakat desa dimana proyek-proyek pembangunan tersebut berlokasi. Jika dilakukan secara benar, penerapan mekanisme tersebut memastikan terjadinya identifikasi

yang menyeluruh dan mendalam hingga ke tingkat grassroots terhadap yang sesungguhnya dibutuhkan masyarakat, walaupun harus melalui proses-proses yang akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Secara eketernal menunjukkan bahwa dukungan pihak swasta menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program *smart* kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Keterlibatan pihak swasta yang mampu menyediakan keuangan dan tenaga ahli setidaknya membantu fungsi pemerintah sebagai motor pelaksana pembangunan. Selain itu pihak swasta juga menciptakan sistem pemerintahan yang bersih karena dalam hal ini pemerintah juga bisa melaksanakan fungsi kontrol terhadap sektor swasta yang terlibat. Sektor swasta haruslah memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan harus diikat dalam suatu kontrak untuk jangka waktu tertentu. Disinilah peran dan fungsi pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan diperlukan. Adanya keterlibatan pihak swasta adalah untuk meraih keuntungan sebagai konsekuensi dalam pembangunan. Namun keuntungan yang didapat oleh pihak swasta ini sudah seharusnya tidak merugikan pembangunan, dimana pihak swasta memberikan dukungan dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kebijakan.

b. Faktor Penghambat

Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi. Beberapa permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi secara internal dapat diketahui dari komitmen pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk peraturan perundang-undangan masih kurang. Belum adanya perangkat perundangundangan sebagai penjabaran dari Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung, sehingga pelaksanaan program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi masih belum maksimal. Komitmen merupakan bentuk terkait dengan kebijakan dari pemerintah dari pengembangan pencapaian tujuan dari program Smart Kampung di Kabupaten Banyuwangi.

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, perangkat pemerintahan di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Hal pemberdayaan masyarakat tersebut tidak terlepas dari ide Griffin yang mengatakan, bahwa persoalan(dan urgensi) kebijakan desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan (*empowerment*), dalam arti memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintahan ditingkat daerah untuk berprakarsa, serta wewenang dan tanggung

jawab dari organisasi pemerintah tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif, dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/Kelurahan Melalui Smart Kampung yang menjadi dasar pelaksanaan program *Smart* Kampung masih bersifat sangat umum dan perlu adanya peraturan perundang-undangan yang menjabarkan dan lebih rinci terkait pelaksanaan program *Smart* Kampung. Peraturan penjabaran ini dapat berupa petunjuk teknis, petunjuk operasional dan juga standar operasional prosedur pelaksanaan program *Smart* Kampung. Kurangnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau personil yang langsung terkait dengan pelaksanaan program *Smart* Kampung terutama operator dan resepsionis. Telah dilakukan berbagai jenis pelatihan yang diberikan kepada operator *Smart* Kampung, namun masih kurangnya pelatihan kepada resepsionis selaku personil yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam proses pelayanan. Resepsionis merupakan garda terdepan dalam pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga perlu adanya resepsionis yang mampu melayani dengan baik

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

a. Memberikan bantuan motivasi moril, bentuk-bentuk bantuan motivasi moril tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Pelatihan usaha

Pelatihan usaha yang dilakukan secara kontinyu dan terprogram merupakan salah satu bentuk nyata dalam pelaksanaan program *smart* kampung. Pelatihan yang dilakukan merupakan bentuk nyata dari aktivitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan. Bentuk pelatihan yang dilakukan dalam program *smart* kampung salah satunya mengenai pelatihan usaha pembuatan piring lidi.

2) Permodalan

Perkembangan usaha yang terdapat di masyarakat desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi semakin hari semakin meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini menjadi hal penting dalam upaya mengembangkan usaha masyarakat. Pada bidang permodalan yaitu

dengan memberikan bantuan modal usaha, dimana pada tahun 2018 total dana yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp.110.000.000,-

3) Pendidikan

Dalam bidang pendidikan tujuan dalam pelaksanaan dari program *Smart Kampung* yaitu adanya upaya peningkatan kualitas pendidikan. Upaya peningkatan pendidikan yang secara nyata dapat ditunjukkan dari kebijakan mengenai pemberian bea siswa kepada siswa atau masyarakat yang memiliki kriteria yang ditetapkan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui program bea siswa kepada keluarga pra sejahtera dengan nilai bea siswa yaitu untuk SD sebesar Rp. 200.000,-/ bulan, SMP sebesar Rp.300.000,- dan SMA yaitu sebesar Rp.350.000,-.

4) Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan pemberdayaan melalui *Smart Kampung*, dalam hal ini terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan yaitu melalui peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas atau proses pembelajaran.

7. Aktor yang terlibat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Smart Kampung di Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

a. Pemerintah Daerah

Penetapan kebijakan terkait dengan upaya pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Smart Kampung. Bentuk kebijakan

terkait dengan tata kelola dalam proses pelaksanaan program dan sebagai pihak yang memberikan pengawasan terkait dengan pelaksanaan program.

b. PT Telkom, Tbk

PT Telkom Tbk Sebagai media pendukung dalam pelaksanaan program, dimana dalam hal ini terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Bantuan pihak swasta dalam proses pendanaan dan proses pendukung fasilitas pelaksana program seperti penyediaan internet.

c. Masyarakat

Memiliki partisipasi dalam pelaksanaan program dan masyarakat merupakan sumbyek yang diberdayakan. Masyarakat melakukan aktivitas secara langsung terkait dengan pelaksanaan program serta memberikan berbagai dukungan sehingga program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

8. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program *smart* kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, yaitu sebagai berikut:

c. Faktor Pendukung

1. Faktor Internal

Adaya komitmen dalam proses pengelolaan desa dan sarana serta prasarana yang dimiliki sehingga aktivitas pemberdayaan dapat

dilakukan. Selain itu dukungan dari sarana serta prasarana yang memberikan dukungan dalam proses pelaksanaan program.

2. Faktor Eksternal

Secara eketernal menunjukkan bahwa dukungan pihak swasta menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program *smart* kampung di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi..

d. Faktor Penghambat

1. Faktor internal, komitmen pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam bentuk peraturan perundang-undangan masih kurang dan aktivitas dalam pelaksanaan program tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
2. Faktor eksternal, jaringan internet yang digunakan untuk program Smart Kampung sering mengalami permasalahan sehingga aktivitas tidak dapat dilakukan secara maksimal.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka perusahaan disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus meningkatkan komitmen atas pelaksanaan program *smart* kampung yaitu dengan menetapkan kebijakan perundangan-undangan secara jelas sehingga program tersebut benar-benar memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat melalui program

pemberdayaan ekonomi yang ditetapkan. Kebijakan tersebut terkait dengan penetapan kebijakan yang benar-benar riil dan proses evaluasi selalu dilakukan sehingga program yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

2. Dalam upaya untuk meningkatkan peran dari program Smart Kampung maka upaya untuk memberikan perbaikan fasilitas pendukung pelaksanaan program harus dilakukan, dimana salah satunya terkait dengan peningkatan kualitas jaringan internet dalam program Smart Kampung. Upaya ini dilakukan karena selama ini fasilitas kualitas jaringan internet masih mengalami beberapa permasalahan. Selain itu beberapa fasilitas dalam layanan aplikasi tersebut segera diperbaiki agar memudahkan penggunaannya
3. Pemerintah daerah diharapkan selalu berupaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program Smart Kampung yang ditetapkan, sehingga kebijakan pemberdayaan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga diharapkan melakukan evaluasi secara berkala atas program-program yang ditetapkan sehingga keberadaan program tersebut benar-benar mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Akib, Dr. Haedar, & Tarigan, Antonius, 2008, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik. Jakarta
- Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta, Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Gramedia
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Budi, Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Daniel, M. 2012. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Darmadi, Damai dan Sukidin. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Harbani, Pasolong. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : CV. Alfabeta
- Hikmat, R. Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Humaniora Utama Press (HUP).
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn, 2006, *Policy Analysis for the Real World*, Oxford University Press.
- Ife, Jim. 2005. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*, Longman Australia.
- Indradi, Sjamsiar Sjamuddin, 2010, *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Cetakan kedua. Malang, Agritek YPN

- Jones, Charles O. 2004, *Pengantar Kebijakan Publik* Terjemahan Ricky Istamto, Jakarta: Roja Grafindo Persada.
- Maksimilianus M. Jupir, 2013, *Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Smart village*(Studi di Kabupaten Manggarai Barat)
- Mardi Yatno Hutomo. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Adiyana Press, Yogyakarta
- Maryono.2010. *Menakar Kebijakan RSBI: Analisis Kritis Studi Implementasi*. Yogyakarta: Magnum pustaka.
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta
- Moleong, Lexy.2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, Suranggana dan Darmawan, 2014. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Aditya Media. Yogyakarta
- N. Viswanadham. 2013. *Smart Village and Smart City. Ecosystem Aware Global Supply Chain Management*. World Science.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy* . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nurmadi, 2013, Rancangan Aplikasi Smart City Berbasis Mobile Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Studi Kasus Pemkot Bogor, *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI*, Vol.3, No.1.
- Patton, J R, Payne, James S, and Smith, Mary Beirne. 2007. *Mental Retardation 2nd Edition* USA: Charles E. Merrill Publishing Company
- Pranarka dan Vidhyandika. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Al Qaprint. Jatinangor.
- Siagian. Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. alfabeta. Bandung
- Suharto, Edi. 2007, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung, Refika Aditama.

- Sukarna. 2003. *Teknik Pengawasan Pegawai*. Jakarta: Jaya Sakti
- Sumardjo. 2009. *Model Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengelolaan Konflik Sosial Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Propinsi Riau*. Riau.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supangat. 2014. *Smart village* Gotong-royong Pada Upacara Adat Etnik Batak. Toba. Medan : Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- Suryana, Siti Erna Latifi, 2009. Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang. *Tesis. Program magister Studi Pembangunan, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara*.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jatinangor : Erlangga
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab Solichin Abdul. 2008, *Analisis kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan Negara*, Ed. 2. Cet. 6. Bumi Aksara: Jakarta.
- Widodo. 2013, *Analisa Kebijakan Publik*. Banyuwangi : Bayumedia Publishing.
- www.banyuwangikab.go.id, diakses tanggal 2 Desember 2018.

LAMPIRAN



Gambar. Peneliti Bersama dengan Informan bapak Syamsul Arifin selaku pegawai
Desa Ketapang bagian Kesejahteraan Masyarakat
Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2019



Gambar. Peneliti bersama Informan bapak Dimas selaku staff desa Ketapang
bagian pengelolaan program *smart* kampung
Sumber: Data Sekunder Dokumentasi Peneliti 2019



PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIPURO
KEPALA DESA KETAPANG
Jl. Gatot Subroto No.88 Telepon (0333) 422165
Ketapang 68464

SURAT KETERANGAN

Nomer Reg. : 470/220/I/429.505.03/2019

- I. Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :
 - a. Nama : **SUROSO R**
 - b. Jabatan : Sekretaris Desa
 dengan ini menerangkan bahwa, seorang :
 - a. Nama : **HERDI FEBRI NUGROHO**
 - b. Tempat/ Tgl. Lahir : Banyuwangi/01-02-1995
 - c. Jenis kelamin : Laki-laki
 - d. Agama : Islam
 - e. Kewarganegaraan : Indonesia
 - f. Nomer KTP : 3510180102950001
 - g. Status Perkawinan : Belum Kawin
 - h. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 - i. Tempat Tinggal : RT. 0021 RW. 001 Dusun Krajan
Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo
Kabupaten Banyuwangi
2. Orang tersebut diatas sudah melakukan penelitian/ survey/ research tentang Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program smart kampung di kantor desa ketapang sejak tgl 21 Januari sampai dengan 20 februari 2019.
3. Surat keterangan ini dikeluarkan akan dipergunakan untuk :
"Kelengkapan Administrasi di UNIVERSITAS BRAWIJAYA"
4. Demikian untuk menjadikan periksa adanya.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. M. Harseno 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : **408** /UN10.F03.11/PN /2019
Lampiran : -
Hal : Surat permohonan Ijin Penelitian Skripsi

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
Di Kabupaten Banyuwangi

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Herdi Febri Nugroho
Alamat : Dusun krajan rt 01 rw 02 Wongsorejo, Wongsorejo. Kab Banyuwangi.
NIM : 145030100111070
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Smart Kampung di Banyuwangi (studi pada Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)
Lamanya : 21 Januari 2019 s/d selesai
Peserta : -

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 09 Januari 2019
a.n. Dekan,
Ketua Jurusan Administrasi Publik


Drs. ANDY FEFTA WIJAYA, MDA, Ph.D
NIP. 19670217 199103 1 010

Formulir diisi rangkap 4 uzuk :

1. Perusaftaan
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Adi Sucipto No. 53 Banyuwangi
 Telp. (0333) 424445 Fax. (0333) 424445
 email : bpm@banyuwangikab.go.id website:www.bpm.banyuwangikab.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 420/ /429.116/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ZEN KOSTOLANI, M.Si
 Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : HERDI FEBRI NUGROHO
 Tempat, tanggal lahir : -
 NIM : 145030100111070
 Program Studi/Jurusan : S-I Ilmu Administrasi / Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang

Mahasiswa tersebut di atas benar-benar telah melakukan Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Januari s/d 20 Februari 2019, dalam rangka untuk menyusun skripsi yang berjudul "PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM SMART KAMPUNG DI KABUPATEN BANYUWANGI, sebagai persyaratan wajib yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 31 Januari 2019

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN BANYUWANGI





BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

INTEGRASI PROGRAM KERJA BERBASIS DESA/KELURAHAN
MELALUI SMART KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu diambil langkah-langkah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara terpadu;
 - b. bahwa setiap program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integral agar dapat meningkatkan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, budaya, dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat;
 - c. bahwa rumusan program kerja dan kegiatan harus mampu mengakomodasi semua kepentingan lapisan masyarakat terutama di tingkat desa/kelurahan, sehingga perlu melibatkan peran serta pemerintah desa dan masyarakat di desa/kelurahan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/ Kelurahan Melalui *Smart* Kampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

